



**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PP NO. 71
TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
DI PEMERINTAHAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan

Oleh:

LIA AULIA
NPM: 1515100108

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LIA AULIA
NPM : 1515100108
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Medan, Mei 2019

KETUA PROGRAM STUDI

(Anggi Pratama Nasution, SE., MSi) -

PEMBIMBING I

(Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si)

DEKAN



(Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum)

PEMBIMBING II

(Herawaty, SE., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA
UJIAN SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : LIA AULIA
NPM : 1515100108
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : SI (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PENERAPAN / STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS
AKRUAL PP NO. 71 TAHUN 2010 DALAM
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Medan, Mei 2019

KETUA



Anggi Pratama Nasution, SE., M.Si

ANGGOTA I

Oktarini Khamila Siregar, SE., M.Si

ANGGOTA II

Hermawaty, SE., MM

ANGGOTA III

Rahima Br. Purba, SE., M.Si, AK, CA

ANGGOTA IV

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.A

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :LIA AULIA
NPM :1515100108
Program Studi :Akuntansi
Jenjang :SI (Strata Satu)
Judul Skripsi :ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PP NO. 71 TAHUN
2010 DALAM PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DI
PEMERINTAHAN KOTA MEDAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan-media/formatkan, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet, atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 April 2019



LIA AULIA
1515100108

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:

Analyzed document: 22/04/2019 09:02:22

"LIA AULIA_1515100108_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

% 170	wrds: 17182	http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-lambang-standar-akuntansi-pem...
% 169	wrds: 17637	http://reprints.iain-sukakarta.ac.id/873/1/SKRIPSI%20FULL.pdf
% 86	wrds: 9618	https://lafahmat.wordpress.com/2011/05/18/pp-no-71-tahun-2010-lambang-standar-akuntansi-p...

Show other Sources:]

Processed resources details:

277 - Ok / 36 - Failed

Show other Sources:]

Important notes:

Wikipedia:	Google Books:	Ghostwriting services:	Anti-cheating:
Wiki Detected!	[not detected]	[not detected]	[not detected]

Excluded Urls:

Included Urls:

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 April 2019
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAD Medan
Di -
Tempat



Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LIA AULIA
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 23 Maret 1998
Nama Orang Tua : MUCHTAR
No. P. M : 1515100108
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. HP : 082274437282
Alamat : Jl. Citarum 1 Desa Medan Krio No 297

Sangat bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pp no. 71 tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan di pemerintah kota medan. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan RKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 - 5 lembar dan 3x4 - 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah di jilid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jenis 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Jukdis Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500.000	650.000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.500.000	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100.000	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.		
Total Biaya	: Rp.	2.100.000	2.250.000

UK. T. 8-12

Rp. $\frac{2.250.000}{1.750.000} + \frac{500.000}{1.750.000}$ 25/04-19.
Rp. 4.000.000
Ukuran Toga : M



Hormat saya

Lia Aulia
LIA AULIA
1515100108

- Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Wis.ybs.

Telah di terima
berkas persyaratan
dapat di proses
Medan, 5 APR 2019.
Ka. BPAA
Teguh Wahyono
TEGUH WAHYONO, S.P.





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Eksekutif UPPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)
(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

: LIA AULIA

Tgl. Lahir

: MEDAN / 23 Maret 1998

Alamat Pokok Mahasiswa

: 1515100108

Program Studi

: Akuntansi

Instansi

: Akuntansi Sektor Publik

Nilai Kredit yang telah dicapai

: 127 SKS, IPK 3.77

Yang ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

Judul Skripsi

Judul Skripsi	Persetujuan
pengaruh sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, pemahaman basis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah (studi kasus di kecamatan tunggal)	<input type="checkbox"/>
implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di sekretariat DPRD MEDAN berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010	<input type="checkbox"/>
analisis penerapan standar akuntansi pemerintah no 71 tahun 2010 dan pengaruhnya terhadap penyajian laporan keuangan studi kasus di kantor kecamatan tunggal)	<input checked="" type="checkbox"/>

Yang ditandatangani oleh Kepala Program Studi dibarengi tanda (2)

Direktur I,

(Dr. Bhakti Alamayah, M.T., Ph.D.)

Medan, 15 Agustus 2018

Pemohon,

(LIA AULIA)

Nomor :
Tanggal :
Disahkan oleh :
Dekan

(Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum.)

Tanggal : 16 Agustus 2018
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing I

(Oktavia Kharimah Sidiq)

Tanggal : 16 Agustus 2018
Disetujui oleh :
Ka. Prodi Akuntansi

(Anas Pratiwi Kusrianto, SE., M.Si)

Tanggal : 18 Agustus 2018
Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing II

(Herangcity, DE SPM)

No. Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 15 Agustus 2018 14:36:17



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : OKBARINI KHAMILAH Srg. SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : HERNAWATI, SE, M.M
 Nama Mahasiswa : LIA AULIA
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1515100108
 Bidang Pendidikan : Setara I (SI)
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Penerapan standar akuntansi Pemerintah Bertas
 Aktual PP NO-71 tahun 2010 dalam Penyajian
 Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3-19	Perbaiki Hasil penelitian dan Pembahasan, Kesimpulan sesuai dgn Kerangka Konseptual		
4-2019	Perbaiki hasil penelitian & tambahkan grafik flow chart siklus Akuntansi publik, Pembahasan, Kesimpulan, Penyajian laporan Keuangan, Abstrak.		
7-2019	Perbaiki dan pertajam latar belakang masalah, Kerangka konseptual dan Pembahasan - ACC & Sidang Meja Hijau		

Pembimbing I

 Okbarini Khamilah Srg, SE, M.Si

Medan, 12 Maret 2019
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Teip (061) 8455571
 website : www.pancebudi.ac.id email: unpeb@pancebudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : **SOSIAL SAINS**
 Dosen Pembimbing I : **OKTARINI (Chamilah Srg. SE, Msi)**
 Dosen Pembimbing II : **Hernawaty, SE, MM**
 Nama Mahasiswa : **LIA AULIA**
 Jurusan/Program Studi : **Akuntansi**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1515100108**
 Bidang Pendidikan : **Strata 1 (S1)**
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : **Analisis Kinerja Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AKRUL DP No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan.**

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12-19	Abstrak perbaiki Nama dosen di kata pengantar perbaiki Daftar Isi → tulisan abstrak / italic Peramoran → rapikan, rapikan halaman Daftar Tabel (sangan disingkat)		
12-19	Perbaiki kata? no kurang huruf, pengurangan awalan → perbaiki kata dan titik boleh diawal kalimat Setelah titik → spasi Tabel 2.1. Judul → Center Bab iv → penggunaan huruf besar, penablikan		
19	Stilah asing tulis miring Negara tanpa diikuti homonyma → huruf kecil Setelah tanda kutip huruf besar Struktur organisasi → sumber stlh dan mng Perhatikan huruf? no kurang Informasi cm 1 tidak usah diom tabel		
19	Acc Sidang Meja Hijau		

12/3/19

 Hernawaty

Medan, 12 Maret 2019
 Diketahui/Ditetujui oleh:
 Dekan,



Valid Lex
21/5-19



Acc & valid
lex
21/5-19

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL PP NO. 71
TAHUN 2010 DALAM PENYAJIAN
LAPORAN KEUANGAN
DI PEMERINTAHAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan

Oleh:

LIA AULIA
NPM: 1515100108

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

SURAT REKOMENDASI IZIN RISET

NOMOR : 070/143 /Balitbang/2019

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 57 Tahun 2001, Tanggal 13 Desember 2001 dan Peraturan Walikota Medan Nomor: 55 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dan mohon membaca/memperhatikan surat dari: Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Nomor: 3541/17/FSSA/2019 Tanggal: 30 Januari 2019 Hal: Penelitian dan Pengembangan Research.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Medan dengan ini memberikan Surat Rekomendasi Magang Kepada :

Nama : Lia Aulia
No. Induk : 1515100108.
Bidang : Akuntansi.
Lokasi : Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan.
Judul : Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintah Kota Medan.
Waktunya : 3 (Tiga) Bulan.
Manggung Jawab : Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

dan ketentuan sebagai berikut :

Sebelum melakukan Magang terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.

Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Magang.

Tidak dibenarkan melakukan Magang atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah direkomendasikan.

Hasil Izin Riset Diserahkan Kepada Kepala Balitbang Kota Medan Selambat-lambatnya 2 (Dua) Bulan Setelah Izin Riset Dalam Bentuk Soft Copy.

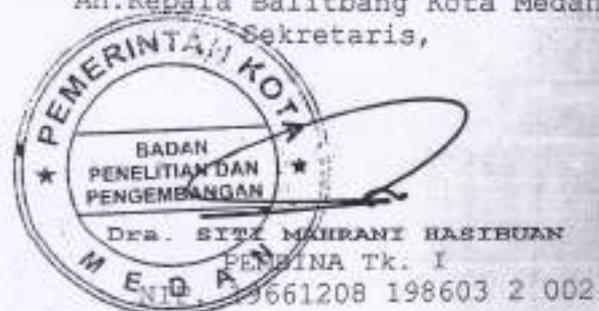
Surat rekomendasi Magang dinyatakan batal apabila pemegang surat rekomendasi tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.

Surat rekomendasi Magang ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan.
Pada Tanggal : 01 Februari 2019

An. Kepala Balitbang Kota Medan
Sekretaris,



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LIA AULIA
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 23 Maret 1998
NPM : 1515100108
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Akuntansi
Alamat : Jalan Citarum 1 Desa Medan Krio No. 297

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 11 April 2019

Yang membuat pernyataan



LIA AULIA



**BERITA ACARA
PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI**

Pada hari ini, Kamis Tanggal, 16 Bulan, Mei..... Tahun, 2019....., telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau Pada Program Studi Akuntansi Semester Tahun Akademik bagi mahasiswa/i atas nama :

- 1. Nama : LIA AULIA
- 2. Npm : 1515100108
- 3. Program Studi : Akuntansi
- 4. Tanggal Ujian : 16 Mei 2019
- 5. Judul Skripsi Lama : Analisis Penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual PP.No.71 tahun 2010 dan Pengaruh terhadap Penyajian Laporan Keuangan
- 6. Judul Skripsi Baru : Analisis Penerapan standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual PP.No.71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan kota Medan

Dinyatakan benar bahwa dalam pelaksanaan ujian Meja Hijau mahasiswa tersebut diatas telah terjadi perubahan judul skripsi yang telah dikendaki oleh Panitia Ujian Meja Hijau.

NO	JABATAN	NAMA DOSEN	TANDA TANGAN
1	Ketua Penguji/ Ketua Program Studi	Anggi Pratama NSE, SE, MSI	
2	Anggota I/ Pembimbing I	Oktarini Kamilah Srg, SE, MM	
3	Anggota II/ Pembimbing II	Herrawaty, SE, MM	
4	Anggota III/ Penguji I	Rahima br. Purba SE, MSI, Akca	
5	Anggota IV/ Penguji II	Hasrul Azwar Hasibuan, SE, MM	

ABSTRAK

Dalam Skripsi ini membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP Nomor 71 tahun 2010 di Pemerintah Kota Medan dengan tujuan untuk mengetahui Analisis dan tantangan Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual untuk menjadi *good governance*. Bagi Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian BPKAD Kota Medan diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, serta *internet searching*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan SAP Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan efektif. Hal ini ditandai dengan telah sesuainya penyusunan Laporan Keuangan di Pemerintah Kota Medan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menerapkan SAP berbasis akrual terdiri dari sistem akuntansi atau *information technology based system*, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi dalam perubahan dan lingkungan/masyarakat, kelima tantangan itu dapat diatasi berbagai kendalanya oleh Pemerintah Kota Medan secara efektif dan efisien. Saat ini Pemerintah Kota Medan menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) untuk mendukung dan menunjang Penerapan SAP berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kata Kunci : Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Tantangan Pemerintah

ABSTRACT

In this thesis discusses the Application of Accrual-Based Government Accounting Standards PP No. 71 of 2010 in the Medan City Government with the aim of finding out the Analysis and challenges of the Medan City Government in applying Accrual-Based Government Accounting Standards to become good governance. For the Medan City Government, especially in the BPKAD Medan area, it is hoped that this research can be useful in applying accrual-based accounting. This research uses descriptive research methods. In collecting data using interviews, observation, and documentation studies, as well as internet searching. The results of the study show that the Implementation of Accrual-Based SAP in Medan City Government is quite good and effective. This is marked by the conformity of the preparation of the financial statements in the City of Medan Government with Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Accrual-Based Government Accounting Standards. The challenges faced by the government in implementing accrual-based SAP consist of an accounting system or information technology based system, commitment from the leadership, availability of competent human resources, resistance in change and the environment / community, the five challenges can be overcome by the City Government of Medan effective and efficient. Currently the Medan City Government uses the SIMDA (Regional Management Information System) application to support and support SAP-based Accrual PP No. 71 of 2010

Keywords : *Accrual-Based Government Accounting Standards and Government Challenges*

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan” dengan lancar. Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE, M.Si selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nst, SE., M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
5. Ibu Hernawaty, SE., MM selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi ini.
6. Bapak Aulia, SE., MM selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu selama perkuliahan.

7. Seluruh Dosen Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Kedua orang tua, Ayahanda Muchtar dan Ibunda Jumarsih, yang telah menjaga, mendidik, serta memberikan kasih sayang dan dorongan semangat kepada penulis dan selalu mendoakan penulis, Semoga Allah menjaga dan membahagiakan mereka di dunia dan di akhirat.
9. Adik tersayang, Adelia Putri dan Alm. Almira Khairani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penuh kepada penulis.
10. Kakak tersayang Rizky Sundari Ramadhani yang selalu mendoakan dan memberikan semangat penuh kepada penulis.
11. Abang dan kakak tersayang, Satria Handika dan Pilvina Chaniago yang selalu memberikan motivasi dan membantu penulis.
12. Kakak tersayang Putri Wulandari yang selalu mendoakan, memberikan motivasi serta membantu penulis.
13. Sahabat – sahabat terbaik dan tersayang Tri Damayanti, Suci Lestari, Rizka Fitriana Hafni, Mila Rusadi, Pitu Dian Sari, Dwi Fahadits, Muhammad Akmal, Tria Bestari dan Devika Nadya yang selalu setia, membantu, berjuang bersama, menemani, memberikan dukungan moral, material dan spiritual , semoga semua menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat.
14. Teman-teman Akuntansi Siang A Universitas Pembangunan Panca Budi Angkatan Tahun 2015.

15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan,
atas bantuannya dalam proses pengumpulan data penyusunan skripsi
ini.

Penulis menyadari, walaupun telah berusaha semaksimal mungkin, namun
masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan diteliti lebih lanjut,
penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai
pihak guna kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi
diri sendiri dan bagi siapapun yang membacanya, aamiin.

Medan, 2019

Penulis

(Lia Aulia)
NPM 1515100108

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Uraian Teoritis.....	8
1. Standar Akuntansi Pemerintah.....	8
a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah.....	8
b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010	9
2. Laporan Keuangan	15
a. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah.....	15
b. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan pelaporan Keuangan.....	28

c. Kualitas Laporan Keuangan	29
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Konseptual.....	33

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
1. Tempat Penelitian	35
2. Waktu Penelitian.....	35
C. Subjek Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
1. Jenis Data	36
2. Sumber Data.....	36
E. Definisi Variabel dan Definisi Operasional.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	39
1. Deskripsi Umum Objek Penelitian	39
a. Sejarah Singkat Tentang BPKAD Kota Medan	39
b. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan.....	40
c. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan	41
2. Analisis Penerapan SAP Berbasis AkruaI PP Nomor 71 Tahun 2010....	45
3. Tantangan Penerapan SAP Berbasis AkruaI PP No. 71 Tahun 2010	51
a. Sistem Akuntansi dan <i>Information Technology (IT) Based System</i> ...	51
b. Komitmen dari Pimpinan	54
c. Tersedianya SDM yang Kompeten	55
d. Resistensi Terhadap Perubahan.....	56
e. Lingkungan/Masyarakat.....	57
4. Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 Pemerintah Kota Medan...	58
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA).....	58
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	59
c. Neraca	60
d. Laporan Operasional	63
e. Laporan Arus Kas.....	65
f. Laporan Perubahan Ekuitas.....	66
B. Pembahasan	67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 70
B. Saran 71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Perbedaan antara SAP akrual dan SAP kas menuju akrual	12
Tabel 2.2 Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran	18
Tabel 2.3 Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	20
Tabel 2.4 Contoh Format Neraca	21
Tabel 2.5 Contoh Format Laporan Operasional	23
Tabel 2.6 Contoh Format Laporan Arus Kas	24
Tabel 2.7 Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas	26
Tabel 2.8 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian	35
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel	36
Tabel 4.1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan	58
Tabel 4.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Medan .	60
Tabel 4.3 Neraca Pemerintah Kota Medan	62
Tabel 4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan	64
Tabel 4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan	65
Tabel 4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan	66

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Medan.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan	41
Gambar 4.2 Siklus Akuntansi	46
Gambar 4.3 Proses Akuntansi Pokok.....	48
Gambar 4.2 Contoh Aplikasi SIMDA BPKAD	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mendapat persetujuan dalam lingkup keuangan pemerintah, pihak eksekutif harus menyusun anggaran dan menyampaikan kepada pihak legislatif serta bertanggungjawab untuk terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*). Sedangkan menurut Bastian (2014:8), Kementerian dalam organisasi sektor publik memiliki wewenang dan tanggung jawab utama termasuk menyediakan laporan keuangan organisasi tersebut.

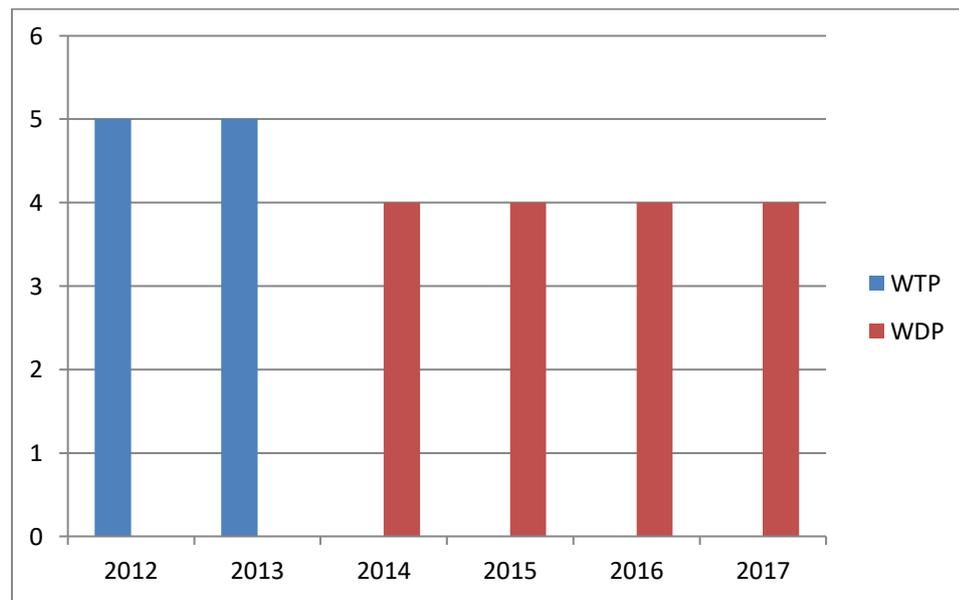
Seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah bahwa setiap entitas pemerintah yang menggunakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban. Pemerintah organisasi sektor publik dapat berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Kementerian, serta Badan Layanan Umum (BLU) dan lainnya. Di Indonesia basis akuntansi yang berlaku meliputi basis kas (*cash basic*) dan basis akrual (*accrual basic*) yang mana basis kas adalah teknik dasar pencatatan dalam akuntansi dimana uang benar-benar diterima dan dikeluarkan. Secara umum dapat didefinisikan adalah peristiwa pada saat kas atau setara kas diterima atau di bayar yang basis kas juga mengakui bahwa

adanya pengaruh transaksi yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Sedangkan menurut KSAP (2010:30) menyatakan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat terjadi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

CTA (*Cash Toward Accrual*) atau disebut juga sebagai akuntansi kas menuju akrual yang menggunakan dasar pencatatan basis akuntansi pada sektor publik atau pemerintahan sampai dengan akhir tahun 2014. Semua entitas diwajibkan menggunakan basis akrual mulai Januari 2015 sebagai dasar pencatatan laporan keuangan sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang maksudnya akan memberikan manfaat lebih bagi para *stakeholder*. Mulai awal Tahun 2015 Laporan Keuangan yang disajikan bertambah 3 Laporan yaitu Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih dari yang sebelumnya berjumlah 4 (empat) Laporan Keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Posisi Keuangan, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual entitas Pemerintah Pusat memiliki kewajiban menyusun 5 (lima) Laporan Keuangan dan tidak termasuk Laporan Arus Kas dan Laporan Saldo Anggaran Kurang/Lebih karena ini menjadi kewajiban Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) (bppk.kemenkeu.go.id).

Fenomena yang terjadi di Pemerintahan Kota Medan adalah selama 4 tahun berturut-turut Pemerintah Kota Medan mendapatkan Opini Wajar

Dengan Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) Perwakilan Sumatera Utara yang disebabkan beberapa faktor yaitu kurangnya SDM yang kompeten dalam memahami SAP Berbasis Akrua PP No.71 Tahun 2010 dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan (www.medanbisnisdaily.com).



Sumber : www.bpk.go.id, www.medanbisnisdaily.com

Gambar 1.1 Hasil Pemeriksaan LKPD Kota Medan

Penyusunan laporan keuangan di Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang mengacu pada Pedoman Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah yang juga didasarkan pada PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kemudian tersedianya SDM yang kompeten menjadi salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah harus fokus dalam menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia dibidang akuntansi pemerintah. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen dari pimpinan dalam hal ini yang berwenang dalam pengambilan keputusan adalah pemimpin organisasi/instansi itu sendiri. Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan suatu perubahan. Lemahnya komitmen dari pimpinan satuan kerja yang menjadi salah satu penyebab kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan di beberapa Kementrian/Lembaga. Faktor selanjutnya adalah sarana pendukung berupa teknologi informasi berupa *hardware* dan *software* yang memadai dalam pelaksanaan SAP berbasis akrual. (Dora, 2014:11)

Dengan diterapkannya SAP ini dapat mempermudah entitas-entitas dan Badan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dalam menyusun laporan akuntansi yang mengikuti pedoman pada standar akuntansi ini sehingga dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang nantinya akan dijadikan faktor penentu kebijakan keuangan dan sebagai alat pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah saat ini telah diamanatkan untuk menerapkan SAP berbasis akrual termasuk Pemerintahan Kota Medan yang menjadi objek penelitian ini. Dengan adanya fenomena dan teori diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Analisis Penerapan Standar**

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Pemko Medan selama 4 Tahun berturut-turut mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK disebabkan karena SDM di Pemko Medan belum sepenuhnya memahami SAP berbasis akrual (PP No. 71 Tahun 2010).

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan batasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 pada PSAP 01 di Pemerintahan Kota Medan dengan dukungan data-data Laporan Keuangan tahun anggaran 2017.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.
- b. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan SAP berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat yaitu:

- a. Bagi penulis diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi dalam ilmu keuangan dan sarana menambah wawasan, khususnya di bidang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Penyajian Laporan Keuangan.
- b. Bagi pemerintah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi lingkup keuangan pemerintah.
- c. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini mendorong dilakukannya penelitian-penelitian Akuntansi Sektor Publik selanjutnya, kemudian dapat memberikan gambaran serta menambah referensi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Evelyn Novianti Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dengan judul “Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah”. Sedangkan penelitian ini berjudul “ Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan Di Pemerintahan Kota Medan”.

Terdapat perbedaan dan persamaan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Variabel Penelitian : Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas yaitu Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 dan 1 variabel terikat yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan penelitian ini menggunakan hanya satu variabel atau tunggal yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal PP No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan.
2. Jumlah observasi/sampel (n) : Penelitian terdahulu dan peneliti saat ini meneliti sesuai dengan kriteria.
3. Waktu Penelitian : Penelitian terdahulu melakukan penelitian pada tahun 2016 sedangkan penelitian ini melakukan penelitian pada tahun 2018.
4. Lokasi Penelitian : Penelitian terdahulu di Kabupaten Gunung Kidul sedangkan penelitian ini di Kota Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Suwanda (2015:86), Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan dasar persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Indonesia.

Sedangkan Mahmudi (2016:29) Menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman yang mengatur bagaimana laporan keuangan tersebut seharusnya disajikan. Standar Akuntansi Pemerintah mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui/dicatat, kapan harus diakui dan bagaimana cara mengukur serta melaporkannya. Terkait dengan standar akuntansi ini, pemerintah pada bulan Juni 2005 mengeluarkan PP No. 24 Tahun 2005 yang akan menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyajikan laporan keuangan.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah ketentuan yang menyatukan persepsi antara pihak penyusun, pengguna dan pihak auditor yang berlaku di suatu negara bertujuan untuk mengatur penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan disetiap daerah untuk mencapai transparansi dan akuntansilitas. Beberapa

pernyataan diatas menyatakan SAP merupakan prinsip/pedoman akuntansi yang harus diterapkan dalam penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan. SAP juga mengatur tentang bagaimana suatu transaksi yang diakui/dicatat, kapan harus transaksi diakui dan bagaimana mengukur dan melaporkannya.

b. Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua No. 71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diperlukan untuk penyelenggaraan akuntansi pemerintah dalam rangka akuntabilitas dan transparansi yang diberlakukan untuk pemerintah pusat dan daerah. Seperti yang tertuang dalam Pasal 32 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur perlunya SAP sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya, yang tertuang pada Pasal 57 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa penyusunan SAP dilakukan oleh suatu Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)..

Menurut PP RI (2005:11) menyatakan bahwa KSAP terdiri dari Komite Konsultatif Standar Akuntansi Pemerintahan (Komite Konsultatif) dan (Komite Kerja). Komite Konsultatif bertugas untuk memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan Konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite Kerja bertugas mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun Konsep-Konsep Rancangan Peraturan tentang Standar Akuntansi Pemerintah kepada Menteri Keuangan untuk proses penetapan menjadi Peraturan Pemerintah.

Akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah (KSAP,2006). Widjarso (2008) menjelaskan bahwa alasan penggunaan basis akrual dalam laporan keuangan, antara lain:

- 1) Akuntansi berbasis kas tidak menghasilkan informasi yang cukup, misalnya transaksi non kas untuk pengambilan keputusan ekonomi misalnya informasi tentang hutang dan piutang, sehingga penggunaan basis akrual sangat disarankan.
- 2) Akuntansi berbasis akrual menyediakan informasi yang tepat untuk menggambarkan biaya operasi yang sebenarnya.
- 3) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan informasi yang dapat diandalkan dalam informasi aset dan kewajiban.

Pelaksanaan basis akrual akuntansi sektor publik adalah untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta menentukan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Pada organisasi sektor publik basis akrual dimaksudkan untuk mengungkapkan informasi mengenai biaya operasi dan biaya pemulihan (*cost recovery*) atas penyediaan suatu pelayanan dan sejauh mana biaya pelayanan tersebut dapat ditutup oleh pendapatan dalam periode tertentu.

Pemerintah Pusat sebenarnya bisa saja langsung berpindah dari basis kas ke basis akrual tetapi karena adanya Peraturan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang tertuang untuk mengatur Pemerintah Daerah dalam menggunakan basis kas modifikasian, yaitu kombinasi dasar kas dengan dasar akrual. Berdasarkan basis kas modifikasian, transaksi penerimaan kas

atau pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayarkan (basis Kas). Kemudian pada akhir periode dilakukan penyesuaian untuk menghasilkan neraca yaitu dengan cara mengakui transaksi dan kejadian dalam periode berjalan meskipun penerimaan atau pengeluaran kas belum terealisasi. Selain itu basis kas modifikasi juga mengukur arus kas dari sumber-sumber keuangan lancar dengan cara mengukur kas dan kewajiban kas dengan mengakui transaksi-transaksi-transaksi yang terjadi pada akhir tahun yang secara normal diharapkan terjadi penerimaan kas serta pengeluaran kas pada periode waktu tertentu setelah akhir tahun.

Pada tahun 2010, untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diterapkan selambat-lambatnya pada tahun 2015. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual (*accual*) oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Saat ini, pemerintah telah menyusun laporan keuangan dengan akuntansi berbasis akrual yang merupakan basis transisi sampai dengan akuntansi berbasis akrual sebagaimana ditetapkan dengan paket UU bidang Keuangan Negara dapat diterapkan di Indonesia.

Menurut Fakhurrazi (2010) manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh

kepada *stakeholders*. Kemudian manfaat selanjutnya adalah dapat memberikan informasi mengenai seluruh pengeluaran yang dibiayai melalui kecukupan penerimaan pemerintah yang salah satunya juga dapat memberikan keseimbangan antar generasi serta untuk mengetahui apakah generasi mendatang juga ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan semata-mata untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan dengan mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya.

2.1 Table Perbedaan antara Basis Kas Menuju AkruaI dan Basis AkruaI:

No	Uraian	Basis Kas Menuju AkruaI	Basis AkruaI
1.	Jenis Laporan	a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas (LAK) d. Catatan Atas Laporan Keuangan	a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) b. Neraca c. Laporan Arus Kas d. Catatan Atas Laporan Keuangan e. Laporan Operasional (LO) f. Laporan Perubahan Ekuitas g. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2.	Pengakuan Pendapatan	Pada saat kas diterima pada RKUN/D (kecuali satker BLU).	a. Pendapatan pada LO saat hak timbul dan atau adanya aliran sumber daya ekonomi. b. Pendapatan pada LRA, saat kas diterima di RKUN/D
3.	Pengukuran Belanja	Pada saat kas dikeluarkan dan RKUN/D (kecuali satker BLU)	a. Beban pada LO saat kewajiban timbul, konsumsi aset, atau penurunan manfaat ekonomis/potensi jasa. b. Belanja pada LRA, saat pembayaran kas keluar dari RKIN/D.

Sumber : *Simanjuntak (2010)*

“Sumber daya manusia, kedudukan, fasilitas dan infrastruktur, peraturan dan intensitas pelatihan administrasi dan akuntabilitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mempengaruhi ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah daerah”(Muda dkk:2014). Ketika SAP berbasis akrual telah ditetapkan maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

telah memiliki pedoman yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Dengan ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat mengimplementasikan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan efektif, efisien dan sesuai sehingga berbagai pihak yang berkepentingan mendapatkan informasi yang andal dan lengkap dilaporan keuangan pemerintah.

Menurut Simanjuntak (2010), tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan akuntansi berbasis akrual di Pemerintahan Indonesia adalah sebagai berikut:

a) Sistem Akuntansi dan *information technolog (IT) based system*

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual dilingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan *IT based system* yang lebih rumit..

b) Komitmen dari pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan. Di undangkannya tiga paket Keuangan Negara serta Undang-Undang Pemerintah Daerah menunjukkan keinginan yang kuat dari pihak eksekutif dan pihak legislative untuk memperbaiki Sistem Keuangan Negara, termasuk perbaikan atas akuntansi pemerintahan. Yang menjadi ujian sekarang adalah peningkatan kualitas produk akuntansi pemerintahan dalam pencatatan dan pelaporan oleh Departemen atau Lembaga di Pemerintah Pusat dan Dinas/Unit

Pemerintah Daerah sistem akuntansi pemerintah pusat mengacu ke pedoman yang disusun oleh Menteri Keuangan.

c) Tersedianya SDM yang kompeten

Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual memerlukan SDM yang memiliki kompetensi, khususnya di bidang akuntansi pemerintahan. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu secara serius menyusun perencanaan SDM dibidang akuntansi pemerintahan. Termasuk didalamnya memberikan sistem insentif dan remunerasi yang memadai untuk mencegah timbulnya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) oleh SDM yang terkait dengan akuntansi pemerintahan.

d) Resistensi terhadap perubahan

Perubahan yang terjadi dapat membuat pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem lama akan sulit untuk mengikuti perubahan yang telah ditetapkan. Untuk itu, penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

e) Lingkungan/Masyarakat

Kepedulian dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintahan. Dengan dukungan yang positif, masyarakat mendorong pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kebijakannya.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan terdiri dari :

- a) PSAP Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan
- b) PSAP Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran
- c) PSAP Nomor 03 Tentang Laporan Arus Kas
- d) PSAP Nomor 04 Tentang Catatan Atas Laporan Keuangan
- e) PSAP Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan
- f) PSAP Nomor 06 Tentang Akuntansi Investasi
- g) PSAP Nomor 07 Tentang Aktiva Tetap
- h) PSAP Nomor 08 Tentang Konstruksi dalam pengerjaan
- i) PSAP Nomor 09 Tentang Akuntansi Kewajiban
- j) PSAP Nomor 10 Tentang Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa
- k) PSAP Nomor 11 Tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
- l) PSAP Nomor 12 Tentang Laporan Operasional

2. Laporan Keuangan

a. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan Keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 dan PP Nomor 24 Tahun 2005 merupakan “Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan”.

Laporan Keuangan adalah produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan. Laporan keuangan yang disusun harus memenuhi prinsip-

prinsip yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 (Erlina, 2008:18).

Laporan Keuangan disusun untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* dalam membuat suatu keputusan dapat lebih berkualitas, bukan hanya itu laporan keuangan juga harus dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai untuk informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Menurut Mardiasmo (2009:161-162) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik yaitu :

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*).
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retropektif (*accountability and retrospective reporting*)
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*Planning and authorization information*)
4. Kelangsungan Organisasi (*viability*)
5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*source of facts and figures*)

Kemudian tujuan laporan keuangan menurut SAP yaitu:

Berdasarkan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan yang merupakan salah satu bagian dari standar akuntansi pemerintahan, dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan pemerintah. Tujuan pelaporan keuangan yaitu untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, dan ekuitas pemerintah
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
5. Menyediakan informasi mengenai cara pelaporan mendanai aktivitasnya memenuhi kebutuhan kasnya
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam penyajian laporan keuangan yaitu terdapat beberapa komponen-komponen dalam satu set laporan keuangan pemerintah yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan *financial* sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (pernyataan No. 1 PP No. 71/2010 Paragraph 14) :

1. Laporan realisasi anggaran

Menurut PP No 71 Tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan

penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.

Berikut ini contoh format dari laporan realisasi anggaran yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 :

2.2 Tabel Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran

Contoh Format Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
4	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx	xx	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 s/d 19)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	xxx	xxx	xx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xx	xxx
38	Belanja Barang	xxx	xxx	xx	xxx
39	Bunga	xxx	xxx	xx	xxx
40	Subsidi	xxx	xxx	xx	xxx
41	Hibah	xxx	xxx	xx	xxx
42	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xx	xxx
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah	xxx	xxx	xx	xxx
47	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xx	xxx
48	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xx	xxx
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xx	xxx
50	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
51	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
52	Jumlah Belanja Modal (46 s/d 51)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
53					
54	BELANJA TAK TERDUGA				
55	Belanja Tak Terduga	xxx	xxx	xx	xxx
56	Jumlah Belanja Tak Terduga (55 s/d 55)	xxx	xxx	xx	xxx
57	JUMLAH BELANJA (43 + 52 + 56)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
58					

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	(%)	Realisasi 20X0
59	TRANSFER				
60	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA				
61	Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xx	xxx
62	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xx	xxx
63	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
64	JUMLAH TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA (61 s/d 63)	xxx	xxx	xx	xxx
65	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (57 + 64)				
66					
67	SURPLUS/DEFISIT (33 - 65)	xxx	xxx	xxx	xxx
68					
69	PEMBIAYAAN				
70					
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
72	Penggunaan SILPA	xxx	xxx	xx	xxx
73	Pencatran Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
74	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xx	xxx
75	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
76	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
77	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
78	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
79	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
81	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
82	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
83	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
84	Jumlah Penerimaan (72 s/d 83)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
85					
86	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
87	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xx	xxx
88	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
92	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	xxx	xxx	xx	xxx
93	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx	xx	xxx
94	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
89	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx	xx	xxx
90	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx	xx	xxx
91	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx	xx	xxx
92	Jumlah Pengeluaran (87 s/d 91)	xxx	xxx	xx	xxx
93	PEMBIAYAAN NETO (84 - 92)	xxxx	xxxx	xx	xxxx
94					
95	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (67 + 93)	xxxx	xxxx	xx	xxxx

Sumber : PP No. 71 Tahun

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dan dengan pos-pos berikut ini :

- a. Saldo Anggaran Lebih Awal
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan
- d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan
- e. Lain-lain
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Berikut ini contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran yang telah tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010

2.3 Tabel Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Contoh Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah

PEMERINTAH DAERAH
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	XXX	XXX
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(XXX)	(XXX)
3	Subtotal (1 - 2)	XXX	XXX
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	XXX	XXX
5	Subtotal (3 + 4)	XXX	XXX
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	XXX	XXX
7	Lain-lain	XXX	XXX
8	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)	XXX	XXX

Sumber : PP No 71 Tahun 2010

3. Neraca

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Berikut ini Contoh format Neraca yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010:

2.4 Contoh Format Neraca

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2			
3	ASET LANCAR		
4	Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
6	Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
7	Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
8	Piutang Pajak	xxx	xxx
9	Piutang Retribusi	xxx	xxx
10	Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
11	Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
17	Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
18	Piutang Lainnya	xxx	xxx
19	Persediaan	xxx	xxx
20	Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx
21			
22	INVESTASI JANGKA PANJANG		
23	Investasi Nonpermanen		
24	Pinjaman Jangka Panjang	xxx	xxx
25	Investasi dalam Surat Utang Negara	xxx	xxx
26	Investasi dalam Proyek Pembangunan	xxx	xxx
27	Investasi Nonpermanen Lainnya	xxx	xxx
28	Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)	xxx	xxx
29	Investasi Permanen		
30	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	xxx	xxx
31	Investasi Permanen Lainnya	xxx	xxx
32	Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)	xxx	xxx
33	Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)	xxx	xxx
34			
35	ASET TETAP		
36	Tanah	xxx	xxx
37	Peralatan dan Mesin	xxx	xxx
38	Gedung dan Bangunan	xxx	xxx
39	Jalan, Ingasi, dan Jaringan	xxx	xxx
40	Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx

Contoh Format Neraca Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
41	Konstruksi dalam Pengerjaan	xxx	xxx
42	Akumulasi Penyusutan	(xxx)	(xxx)
43	Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)	xxx	xxx
44			
45	DANA CADANGAN		
46	Dana Cadangan	xxx	xxx
47	Jumlah Dana Cadangan (46)	xxx	xxx
48			
49	ASET LAINNYA		
50	Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
51	Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
52	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	xxx	xxx
53	Aset Tak Berwujud	xxx	xxx
54	Aset Lain-Lain	xxx	xxx
55	Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)	xxx	xxx
56			
57	JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)	xxxx	xxxx
58			
59	KEWAJIBAN		
60			
61	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
62	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	xxx	xxx
63	Utang Bunga	xxx	xxx
64	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	xxx	xxx
65	Pendapatan Diterima Dimuka	xxx	xxx
66	Utang Belanja	xxx	xxx
67	Utang Jangka Pendek Lainnya	xxx	xxx
68	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (62 s/d 67)	xxx	xxx
69			
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
71	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	xxx	xxx
72	Utang Dalam Negeri - Obligasi	xxx	xxx
73	Premium (Diskonto) Obligasi	xxx	xxx
74	Utang Jangka Panjang Lainnya	xxx	xxx
75	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang (71 s/d 74)	xxx	xxx
76	JUMLAH KEWAJIBAN (68+75)	xxx	xxx
77			
78	EKUITAS		
79	EKUITAS	xxx	xxx
80	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (76+79)	xxxx	xxxx

Sumber : PP No 71 Tahun

4. Laporan Operasional

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang menyajikan pos-pos seperti Pendapatan-LO, beban, transfer, pos luar biasa dan surplus/deficit sebagai berikut :

Berikut ini contoh format laporan operasional yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 :

2.5 Tabel Contoh Format Laporan Operasional

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA					
LAPORAN OPERASIONAL					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0					
(Dalam rupiah)					
No	URAIAN	20X1	20X0	Kenalkan/ Penurunan	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
2	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx	xxx
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx	xxx
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
6	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	xxx	xxx	xxx	xxx
7					
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx	xxx
13	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx	xxx
14	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)	xxx	xxx	xxx	xxx
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx	xxx
19	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx	xxx
20	Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19)	xxx	xxx	xxx	xxx
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx	xxx
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
25	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	xxx	xxx	xxx	xxx
26	Jumlah Pendapatan Transfer (16 + 20 + 25)	xxx	xxx	xxx	xxx
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
30	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx	xxx
31	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (28 s/d 31)	xxx	xxx	xxx	xxx
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	xxx	xxx	xxx	xxx
34					
35	BEBAN				
36	Beban Pegawai	xxx	xxx	xxx	xxx
37	Beban Persediaan	xxx	xxx	xxx	xxx
38	Beban Jasa	xxx	xxx	xxx	xxx
39	Beban Pemeliharaan	xxx	xxx	xxx	xxx
40	Beban Perjalanan Dinas	xxx	xxx	xxx	xxx
41	Beban Bunga	xxx	xxx	xxx	xxx
42	Beban Subsidi	xxx	xxx	xxx	xxx
43	Beban Hibah	xxx	xxx	xxx	xxx
44	Beban Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx	xxx
45	Beban Penyusutan	xxx	xxx	xxx	xxx
46	Beban Transfer	xxx	xxx	xxx	xxx
47	Beban Lain-lain	xxx	xxx	xxx	xxx
48	JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)	xxx	xxx	xxx	xxx
49					
50	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)	xxx	xxx	xxx	xxx
51					
52	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL				
53	Surplus Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
54	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
55	Defisit Penjualan Aset Nonlancar	xxx	xxx	xxx	xxx
56	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	xxx	xxx	xxx	xxx
57	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx	xxx	xxx	xxx
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)	xxx	xxx	xxx	xxx
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (50 + 58)	xxx	xxx	xxx	xxx
60					
61	POS LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
63	Beban Luar Biasa	xxx	xxx	xxx	xxx
64	POS LUAR BIASA (62-63)	xxx	xxx	xxx	xxx
65	SURPLUS/DEFISIT-LO (59 + 64)	xxx	xxx	xxx	xxx

Sumber : PP No. 71 Tahun

5. Laporan Arus Kas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Berikut ini contoh format laporan arus kas yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 :

Tabel Format Laporan Arus Kas

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan Pajak Daerah	XXX	XXX
4	Pendapatan Retribusi Daerah	XXX	XXX
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
6	Lain-lain PAD yang sah	XXX	XXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
8	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
9	Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXX	XXX
12	Dana Penyesuaian	XXX	XXX
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
14	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
15	Pendapatan Hibah	XXX	XXX
16	Pendapatan Dana Darurat	XXX	XXX
17	Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	XXX	XXX
19	Arus Keluar Kas		
20	Belanja Pegawai	XXX	XXX
21	Belanja Barang	XXX	XXX
22	Bunga	XXX	XXX
23	Subsidi	XXX	XXX
24	Hibah	XXX	XXX
25	Bantuan Sosial	XXX	XXX
26	Belanja Tak Terduga	XXX	XXX
27	Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
28	Bagi Hasil Retribusi	XXX	XXX
29	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 29)	XXX	XXX
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 - 30)	XXX	XXX
32	Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan		
33	Arus Masuk Kas		
34	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXX	XXX
35	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
36	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
37	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap	XXX	XXX
39	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXX	XXX
40	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 39)	XXX	XXX
41	Arus Keluar Kas		
42	Belanja Tanah	XXX	XXX
43	Belanja Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
44	Belanja Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
45	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
46	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
47	Belanja Aset Lainnya	XXX	XXX
48	Jumlah Arus Keluar Kas (42 s/d 47)	XXX	XXX
49	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (40 - 48)	XXX	XXX

LAPORAN ARUS KAS
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0
Metode Langsung

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	20X1	20X0
50	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan		
51	Arus Masuk Kas		
52	Pencairan Dana Cadangan	XXX	XXX
53	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXX	XXX
54	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
55	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
56	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
57	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
58	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
59	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
60	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
61	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
62	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
63	Jumlah Arus Masuk Kas (52 s/d 62)	XXX	XXX
64	Arus Keluar Kas		
65	Pembentukan Dana Cadangan	XXX	XXX
66	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
67	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	XXX	XXX
68	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
69	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
70	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	XXX	XXX
71	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
72	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	XXX	XXX
73	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
74	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
75	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Keluar Kas (65 s/d 75)	XXX	XXX
77	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (64 - 76)	XXX	XXX
78	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
79	Arus Masuk Kas		
80	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
81	Jumlah Arus Masuk Kas (80 s/d 80)	XXX	XXX
82	Arus Keluar Kas		
83	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
84	Jumlah Arus Keluar Kas (83 s/d 83)	XXX	XXX
85	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (81 - 84)	XXX	XXX
86	Kenalkan/Penurunan Kas (31 + 48 + 77 + 86)	XXX	XXX
87	Saldo Awal Kas di BUD	XXX	XXX
88	Saldo Akhir Kas di BUD (88 + 87)	XXX	XXX
89	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
90	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
91	Saldo Akhir Kas (88 + 89 + 90)	XXX	XXX

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut PP No. 71 Tahun 2010 Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi kesalahan serta ekuitas akhir.

Berikut ini contoh format laporan perubahan ekuitas yang tertuang dalam PP No 71 Tahun 2010 :

2.6 Tabel Format Laporan Perubahan Ekuitas

Contoh Format Laporan Perubahan Ekuitas Provinsi/Kabupaten/Kota

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	EKUITAS AWAL	XXX	XXX
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	XXX	XXX
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	XXX	XXX
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	XXX	XXX
6	LAIN-LAIN	XXX	XXX
7	EKUITAS AKHIR	XXX	XXX

Sumber : PP No. 71 Tahun 2010

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- b. Informasi tentang Kebijakan Fiskal/Keuangan dan ekonomi makro

- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkannya atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan
- f. Informasi yang diharuskan oleh pernyataan Standar Akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan

Komponen-komponen diatas disajikan dalam entitas pelaporan dimana entitas pelaporan merupakan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai *accounting entity* yang bertanggungjawab dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Paragraph 25 dalam Kerangka Konseptual akuntansi pemerintah, laporan keuangan yang disusun oleh entitas pelaporan sebagai alat untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas
2. Manajemen
3. Transparasi

4. Keseimbangan antargenerasi
5. Evaluasi kinerja

b. Prinsip-Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Dadang, dan Hendrik (2015:52-53) menyatakan bahwa Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.

Ada 8 (delapan) prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu:

1. Basis Akuntansi
2. Nilai Historis
3. Realisasi (*realization*)
4. Subtansi Mengungguli Bentuk Formal (*substance over form*)
5. Periodisitas (*periodicity*)
6. Konsistensi (*consistency*)
7. Pengungkapan Lengkap (*full disclosure*)
8. Penyajian Wajar (*fair presentation*)

c. Kualitas Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan adalah proses akhir dari semua bukti asli transaksi yang disingkat secara efektif dan efisien untuk tercapainya pemerintah yang baik (*good government*). Untuk memberikan informasi tentang posisi modal, harta dan hutang yang terjadi dalam suatu Perusahaan atau Instansi Pemerintahan serta laba ruginya maka dari itu sudah menjadi kewajiban disusunnya laporan keuangan. “Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya” Pernyataan ini dijelaskan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Ada beberapa Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan yang merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010 yaitu :

1) Relevan

Laporan keuangan biasa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaanya.

Informasi yang relevan tersebut ialah :

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material tetapi jika hakikat atau

penyajianya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4) Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Dengan demikian SAP merupakan persyaratan utama dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum. Antara penerapan standar akuntansi pemerintah yang penyusunan dan penyajian laporannya sesuai dengan pernyataan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang juga menjelaskan bahwa “SAP adalah prinsip-prinsip atau pedoman akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah” yang kaitannya sangat erat dengan kualitas laporan keuangan.

B. Penelitian Terdahulu

Didalam penelitian ini penulis memiliki beberapa penelitian terdahulu yang telah dijadikan sebagai referensi dalam penulisan skripsi secara ringkas penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

2.8 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul	Variable X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Peneliti
1.	Yunita Kurnia Shanti (2018)	Analisis Penerapan Basis Akruaal Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur)	Penerapan Basis Akruaal Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71	Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan	Deskriptif Kualitatif	Penerapan basis akrual pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP 71 Tahun 2010 dampaknya yang ditimbulkan dengan adanya sistem akuntansi berbasis (SIMRAL) bahwa penyusunan laporan keuangan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
2.	Friska Langelo, D.P.E Saerang, S.W.Aleca (2015)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruaal	Penyajian Laporan Keuangan	Deskriptif	Pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tetapi telah sesuai dengan PP NO. 24 Tahun 2005 yaitu menggunakan basis kas menuju akrual, dan juga terdapat perangkat pendukung yang belum teruji.
3.	Amelia Tirta Yuningsih (2018)	Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP Berbasis Akruaal	Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010	Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan	Kualitatif	Menunjukkan bahwa penerapan SAP di Politeknik Makassar sudah cukup efektif. Hal tersebut ditandai

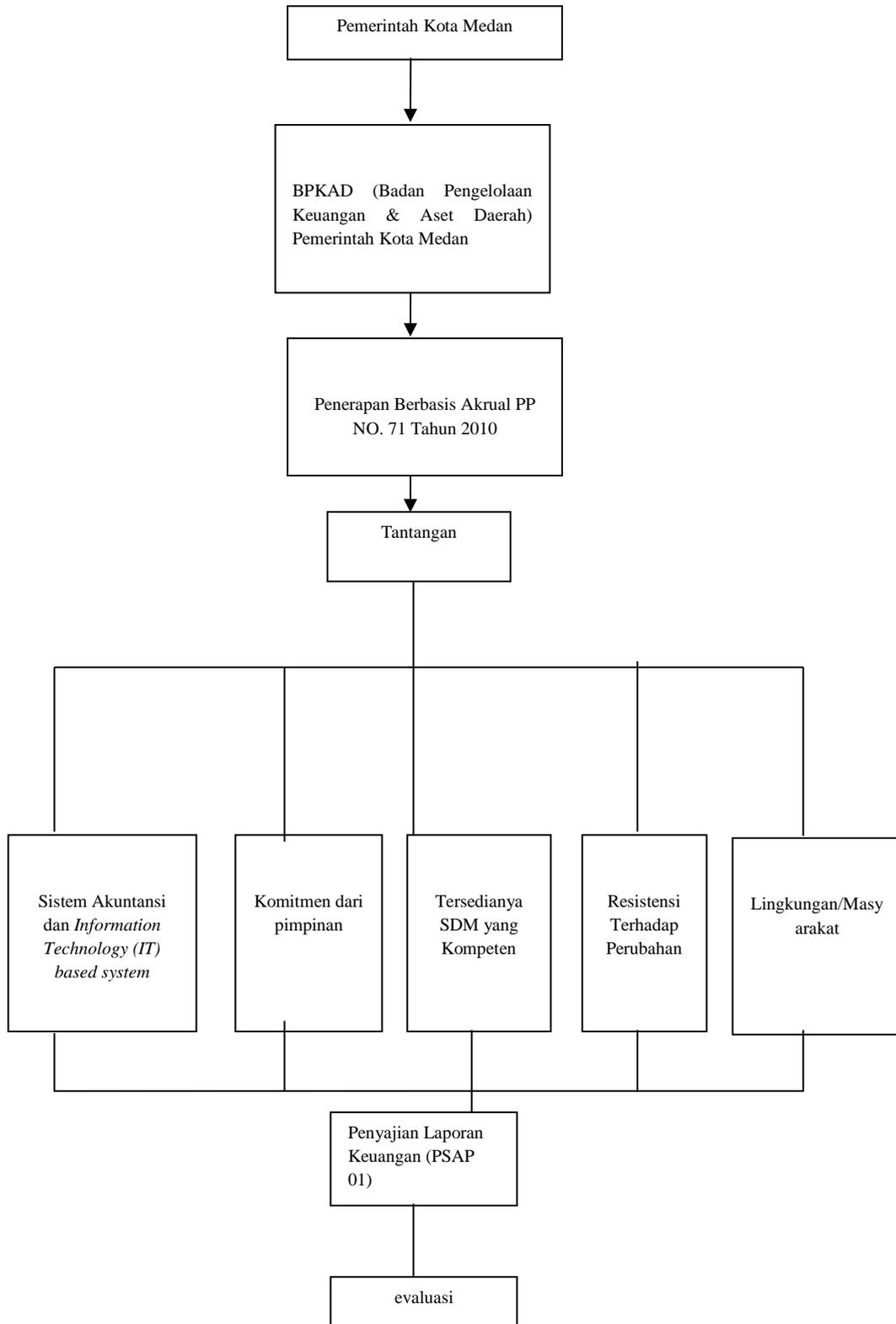
		Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar	tentang Berbasis Akrua	Makassar		dengan penyusunan laporan keuangan yang telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
4.	Evelyn Novianti (2016)	Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014 Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2014	Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Deskriptif Komparatif	Menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diatur pada PP 71 Tahun 2010 .
5.	EP. Mentu, J.J Sondakh (2016)	Penyajian Laporan Keuangan Daerah Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Prov. Sulut	Penyajian Laporan Keuangan	Sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan	Deskriptif	Menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dnas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

C. Kerangka Konseptual

Penyajian laporan keuangan merupakan proses akhir dari semua bukti asli transaksi yang disingkat secara efektif dan efisien untuk mencapai pemerintahan yang baik (*good government*) sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memenuhi suatu kewajiban dalam rangka pemenuhan kebutuhan bersama.

Menurut Hariadi, dkk, (2010:115) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan acuan wajib dalam penyajian laporan keuangan pemerintah. Pengguna laporan keuangan termasuk legislative akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Dari landasan teori singkat tersebut dapat digambarkan kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono,2012:13).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Medan Jl. Kapten Maulana Lubis No.2, Petisah Tengah, Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20112.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai dari bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan April 2019 , adapun rincian waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Agustus s/d November 2018				Desember 2018				Januari 2019				Februari 2019				Maret 2019				April 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengesahan Judul	■	■																						
2.	Persiapan Proposal			■	■	■	■	■	■																
3.	Pengajuan Proposal					■	■	■	■																
4.	Persetujuan Proposal							■	■	■	■														
5.	Seminar Proposal									■	■	■	■												
6.	Penyusunan Skripsi											■	■	■	■										
7.	Persetujuan Skripsi													■	■	■	■								
8.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■

Sumber : Penulis 2019

C. Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Didalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah kepala bidang pembukuan serta staf-staf yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mana data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. Yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, meliputi: Sejarah singkat berdirinya Pemerintah Kota Medan, visi dan misi, struktur organisasi, tantangan-tantangan dalam menerapkan SAP berbasis akrual, dan penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan sesuai dengan PSAP 01.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, data primer dalam penelitian ini yaitu kepala bagian pembukuan akuntansi serta staf-staf yang ada di BPKAD Kota Medan dan data sekundernya adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Medan.

E. Definisi Variabel dan Definisi Operasional

Penelitian memiliki satu variable/tunggal yaitu Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010 Dalam Penyajian Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Medan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua No. 71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Keuangan	Prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. <i>Sumber (Suwanda, 2015:86)</i>	1. Sistem Akuntansi dan <i>Information Tecnology (IT) based system</i> . 2. Komitmen dari pimpinan 3. Tersedianya SDM yang kompeten. 4. Resistensi terhadap perubahan 5. Lingkungan/masyarakat. <i>Sumber(simanjuntak, 2010)</i>

Sumber : peneliti (2018)

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Sugiyono (2014:226) menyatakan bahwa Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu memperoleh fakta mengenai dunia nyaa yang diperoleh melalui pengamatan.

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2014:231), Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Metode ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber.

3. Dokumentasi

Menurut Shanti, yunita kurnia (2018) Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperlukan berupa dokumen-dokumen yang

berhubungan dengan penelitian yang diperoleh melalui proses permintaan peneliti secara langsung kepada bagian akuntansi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dimana data dari Pemerintahan Kota Medan Pada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah) dianalisis dengan menggunakan kalimat sebagai dasar teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan berfungsi sebagai penjelasan atas analisis data.

Langkah-langkah teknik analisis data didalam penelitian ini adalah :

1. Melakukan identifikasi terhadap LKPD Kota Medan terkait penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.
2. Mendeskripsikan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Medan.
3. Menganalisis kesesuaian data yang didapat dengan PP No. 71 Tahun 2010:
 - a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - c) Laporan Neraca
 - d) Laporan Operasional (LO)
 - e) Laporan Arus Kas
 - f) Laporan Perubahan Ekuitas
 - g) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
4. Mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi tantangan-tantangan untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Umum Objek Penelitian

a. Sejarah Singkat Tentang Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Medan

Badan Pengelola Keuangan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan disahkan pada tanggal 28 Desember 2011. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien, Pemerintah Republik Indonesia melakukan reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara, dimana reformasi ini dilatarbelakangi oleh faktor kebutuhan penggantian peraturan perundang-undangan keuangan yang masih mengacu pada peninggalan pemerintah kolonial. Hal ini dikaitkan dengan besarnya belanja negara sehingga diperlukan suatu metode pengawasan yang memadai selain pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pengawasan dapat dilakukan secara internal yaitu melalui satuan kerja pengawasan dan secara eksternal yaitu keterlibatan masyarakat dan pengelolaan keuangan negara, maka untuk itulah diperlukan pertanggungjawaban pemerintahan secara transparan atas penggunaan pajak yang bersumber dari masyarakat. Sebagai pendukung penerapan pelaksanaan *good governance* maka dapat dilakukan dengan cara :

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum
2. Penataan Kelembagaan
3. Penataan Sistem Pengelolaan Keuangan Negara

4. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang keuangan

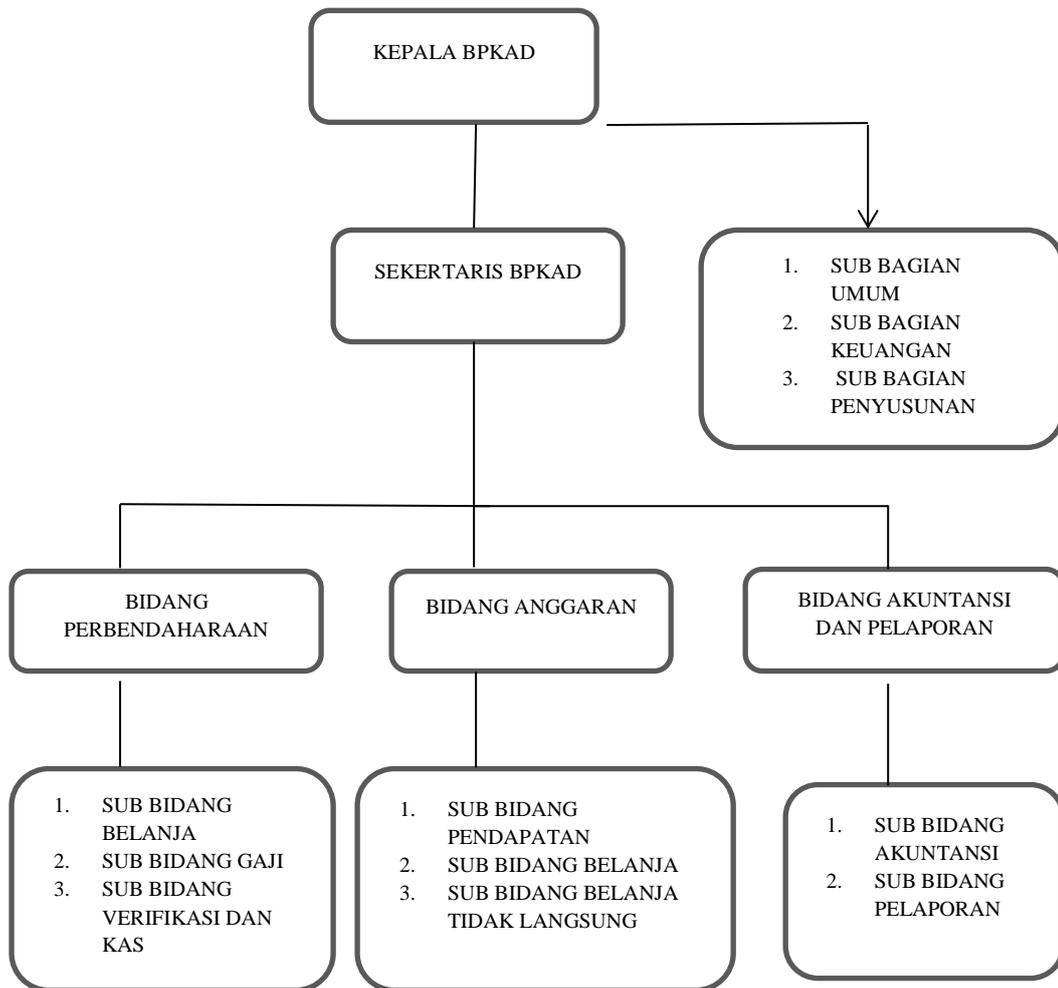
b. Visi dan Misi BPKAD Kota Medan

Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan 2011/2015 yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang Profesional, Berwawasan Manajemen Pengelolaan Keuangan yang sistematis, efektif dan efisien”.

Sedangkan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan transparansi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah kota medan
2. Meningkatkan sistem pengelola keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi perangkat daerah kota medan

c. Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan



Sumber : www.bpkd.pemkomedan.go.id

GAMBAR 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan

Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan wewenang dan tanggung jawab dalam system kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama. Berikut ini deskripsi tugas BPKAD Kota Medan :

1. Kepala BPKAD

Tugas Kepala BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah .
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.

2. Sekretariat

Tugas sekretariat adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat
- b. Pengkoordinasi penyusunan perencanaan program Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKAD, dll.

Sekretariat membawahi beberapa sub bagian, yaitu diantaranya :

a. Sub Bagian Umum

Tugas Sub bagian umum adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum
2. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
3. Pengelolaan hubungan masyarakat, dll.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas sekretariat dalam lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

Bidang perbendaharaan membawahi beberapa sub bagian, yaitu:

1) Sub Bidang Gaji

Sub bidang gaji memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan dalam lingkup gaji.

2) Sub Bidang Belanja

Sub Bidang Belanja dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan.

3) Sub Bidang Verifikasi dan Kas

Sub Bidang Verifikasi dan Kas memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas Bidang Perbendaharaan.

4. Bidang Anggaran

Bidang anggaran memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Bidang anggaran membawahi beberapa sub bagian, yaitu :

1) Sub Bidang Pendapatan

Sub bidang pendapatan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup pendapatan dan pembiayaan.

2) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub bidang belanja tidak langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup belanja tidak langsung.

3) Sub Bidang Belanja Langsung

Sub bidang belanja langsung memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran dalam lingkup belanja langsung.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi dan pelaporan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas BPKAD dalam lingkup akuntansi dan pelaporan.

2. Analisis Penerapan SAP Berbasis Akruwal PP Nomor 71 Tahun 2010

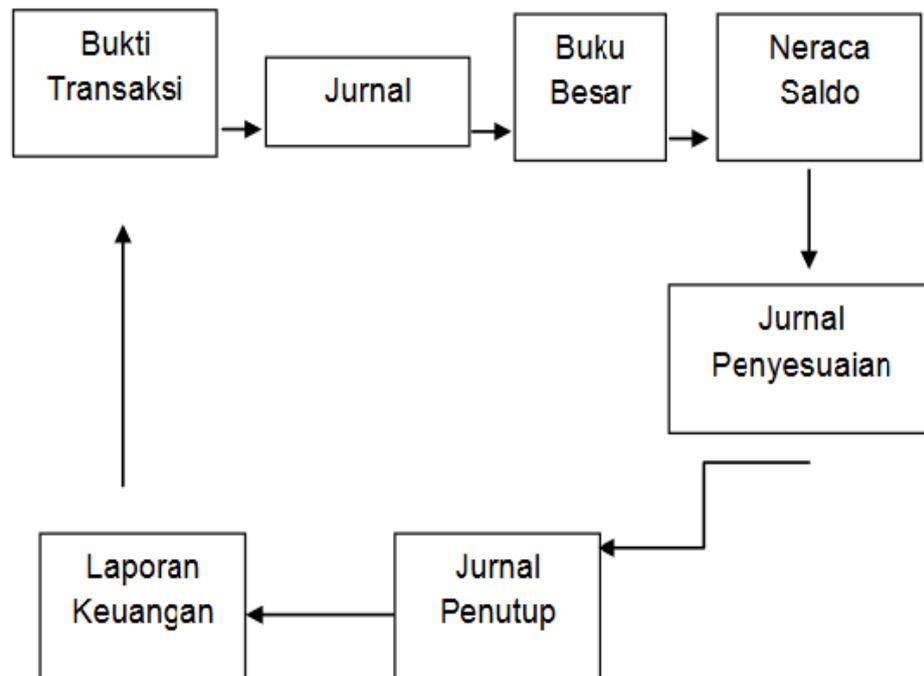
Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 PP No. 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa penerapan SAP berbasis akruwal dapat dilaksanakan secara bertahap. Kemudian keputusan penghapusan SAP berbasis kas menuju akruwal yang telah berganti pada Penerapan SAP berbasis akruwal secara penuh mulai tahun 2015 yang sesuai dengan munculnya PP No. 71 Tahun 2010.

Selanjutnya untuk menjawab rumusan masalah tentang Bagaimana penyajian laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan, apa sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruwal?. Hal tersebut telah di paparkan oleh Kepala Bagian Pembukuan Pemko Medan :

“Laporan Keuangan kami sudah berbasis akruwal sejak tahun 2015.”
(Wawancara Tanggal 14 Februari 2019)

Dari hasil pemaparan informan di atas serta dokumen laporan keuangan Pemerintah Kota Medan yang di dapatkan oleh peneliti, basis akuntansi yang digunakan serta komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PSAP 01 paragraph 14.

Setiap entitas daerah memiliki siklus akuntansi, berikut ini dapat dilihat siklus akuntansi mulai dari transaksi hingga menjadi laporan keuangan :



Sumber : *pusdikmin.com*

Gambar 4.2 Gambar Siklus Akuntansi

a. Proses pengumpulan data (dokumen sumber)

Dokumen sumber merupakan dasar yang digunakan untuk melakukan pencatatan akuntansi (jurnal/proses input data) serta dokumen yang berisi tentang informasi transaksi keuangan. Dokumen Sumber pengakuan Pendapatan-LO terdiri dari Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Tanda Setoran, dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank sedangkan Dokumen Sumber pengakuan Beban terdiri dari Surat Tagihan dan Berita Acara Serah Terima Barang lalu Dokumen Sumber Pengakuan Pendapatan-LRA terdiri dari Surat Tanda Setoran (STS) untuk Pendapatan Asli Daerah dan Nota Kredit/Bukti Transfer Bank untuk Pendapatan Dana Perimbangan kemudian Dokumen Sumber pengakuan Belanja yang

terdiri dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU/LS/NIHIL untuk Belanja Pegawai Barang dan Jasa, dan Belanja Modal selanjutnya Dokumen Sumber untuk transaksi lainnya yang terdiri dari Rekapitulasi Gaji untuk potongan PFK, STS PFK, Rekapitulasi penyusutan asset tetap, Rekapitulasi penyisihan piutang, Bukti Memorial penyesuaian akhir tahun, dan SK penghapusan asset tetap. Pernyataan diatas menjabarkan tentang siklus pertama dalam pembuatan laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan.

b. Pencatatan Transaksi

Proses pencatatan transaksi adalah proses dimana dokumen sumber dijadikan sebagai pedoman dalam mencatat di buku jurnal. Buku jurnal yang di selenggarakan yaitu Buku Jurnal Transaksi, Buku Jurnal Penyesuaian dan Buku Jurnal Penutup

c. Pengklasifikasian

Pengklasifikasian adalah proses dimana seluruh transaksi di buku jurnal di *posting* ke buku besar dan buku pembantu di subsistem masing-masing.

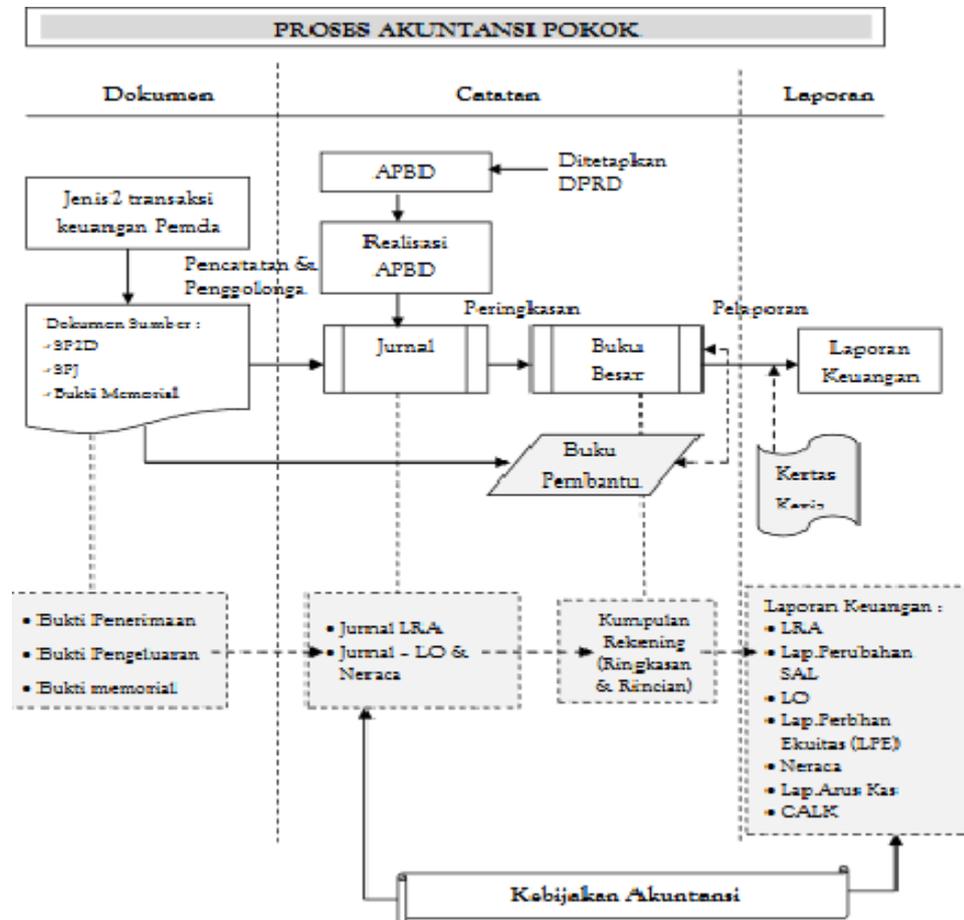
d. Pengikhtisaran

Pengikhtisaran adalah proses dimana penyusunan kertas kerja mulai dari neraca saldo, jurnal penyesuaian, jurnal penutup serta neraca saldo setelah penutupan.

e. Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan di susun pada akhir tahun anggaran maupun pada periode-periode tertentu.

Berikut ini terlihat secara terperinci di gambar ke 2 yaitu proses akuntansi keuangan daerah :



Sumber : keuda.kemendagri.go.id

4.3 Gambar Proses Akuntansi Pokok

Gambar diatas menunjukkan bagaimana cara pembuatan laporan keuangan di setiap daerah seperti di Pemerintah Kota Medan agar laporan yang dihasilkan menjadi transparan dan akuntabel serta di pahami oleh pengguna laporan keuangan dan masyarakat.

Adanya siklus akuntansi yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan SAP berbasis akrual PP No. 71 Tahun 2010,

berikut ini contoh transaksi dan penjurnalan berbasis akrual di Pemerintahan Kota Medan:

13 Jan 2017 menerbitkan SKP yang menyatakan bahwa Pemerintah Kota Medan memiliki pendapatan pajak hotel sebagai berikut:

- a. Pajak Hotel J.W Marriot Rp. 120.000.000
- b. Pajak Hotel Sartika Rp. 50.000.000

16 Jan 2017 Bendahara Penerimaan Pemko Medan menerima uang dari Hotel Aryaduta Medan dan menyetorkan uang pajak hotel tersebut ke Rekening Kas Daerah pada hari yang sama sebesar Rp. 30.000.000.

24 Jan 2017 Pemerintah Kota Medan mengeluarkan uang untuk :

- a. Membeli makan untuk rapat Rp. 1.500.000
- b. Membayar biaya pemeliharaan peralatan dengan menggunakan uang persediaan sebesar Rp. 6.000.000

TGL	AKUN	DEBIT (RP)	KREDIT (RP)
13 JAN 2017	Kas di Bendahara Pengeluaran		-
	Piutang Pajak Hotel	170.000.000	
	Pendapatan Pajak Hotel-LO	-	170.000.000
16 JAN 2017	Kas di Bendahara Penerimaan	30.000.000	-
	Piutang Pajak Hotel	-	30.000.000
	RK PPKD	30.000.000	-
	Kas di bendahara penerimaan	-	30.000.000

24 Jan 2017	Beban Konsumsi Makanan	1.500.000	-
	Beban Pemeliharaan Kendaraan	6.000.000	-
	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	7.500.000

Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pemantauan pengendalian intern menjadi salah satu yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pimpinan Instansi harus memperhatikan dengan serius terhadap kegiatan pemantauan atas perkembangan misi organisasi dan pengendalian intern. Pengendalian yang di pantau dengan baik tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat baik dalam jangka waktu tertentu.

Ketika menerapkan SAP berbasis akruaI PP Nomor 71 Tahun 2010 setiap Pimpinan instansi Pemerintah bertanggungjawab baik dari segi praktik detail, prosedur, serta mengembangkan kebijakan untuk memastikan bahwa unsur yang telah menyatu dan menjadi bagian integral pemerintah serta untuk menyesuaikan kegiatan Instansi pemerintah. Hal serupa telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan sebagaimana yang dipaparkan oleh Kepala Bagian Pembukuan sebagai berikut :

“Ya kita selalu melakukan pemantauan setiap bulan, triwulan, dan persemester dengan cara pendampingan dan rekonsiliasi.”
(Wawancara 14 Februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan SAP berbasis akrual untuk menunjang dan memperkuat efektifitasnya, Pemerintah Kota Medan harus melakukan beberapa pengendalian intern dengan cara pemantauan yang berfungsi untuk melakukan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Kota Medan untuk penilaian independennya, terutama dalam penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010.

3. Tantangan Penerapan SAP Berbasis Akrual PP No. 71 Tahun 2010

Perlunya upaya dan kerja sama dari berbagai pihak yang membuat keberhasilan perubahan akuntansi pemerintahan dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Sehubungan dengan rumusan masalah yang akan dijawab mengenai kendala atau tantangan yang dihadapi dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual ini di Pemerintah Kota Medan yaitu :

a. Sistem Akuntansi dan *Information Technology (IT) Based System*

Sistem akuntansi adalah sistem yang diperlukan oleh pihak pemerintahan untuk mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Kompleksitas implementasi penerapan akuntansi berbasis akrual yang membuat sistem *Information Technology (IT) based system* menjadi lebih rumit.

Dalam penerapan system akuntansi pemerintah berbasis akrual, berpengaruh dengan perubahan system akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual, berikut ini pemaparan Dalam penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, sangat berpengaruh dengan

perubahan sistem akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual, berikut pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan:

“Masalah sistem informasinya sampai saat ini Pemko Medan masih memakai aplikasi SIMDA dalam pengelolaan data keuangannya serta sistem penggajiannya. Jadi untuk saat ini ya apapun yang kendala ataupun terkait dengan sistem ya kita selalu komunikasi dengan BPKP, jadi kendala-kendala disini tidak terlalu besar hanya beberapa item saja dan tidak terlalu rumit juga untuk dipahami oleh SDM nya walau ada beberapa SDM juga yang kurang memahami sistem informasi akuntansi ini .”(Wawancara 14 februari 2019)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa perubahan sistem informasi akuntansi berbasis akrual tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi Pemerintah Kota Medan karena mereka selalu berkomunikasi dengan BPKP untuk mengurangi kendala-kendala yang ada sehingga SDM di Pemerintah Kota Medan dapat dengan mudah memahami sistem akuntansi berbasis akrual dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Kemudian aplikasi yang digunakan oleh BPKAD Kota Medan adalah SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang berguna mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini penting guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuju terwujudnya *good governance*.

laporan keuangan dibuat oleh pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan seperti yang tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 60 adalah:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- 3) Laporan Operasional (LO)
- 4) Neraca
- 5) Laporan Arus Kas (LAK)
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Secara manual atau menggunakan aplikasi komputer proses pembukuan tetap sama yaitu di mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan di Pemerintah Kota Medan disajikan menggunakan Program Aplikasi SIMDA, namun terdapat proses dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh fungsi pembukuan atau akuntansi agar laporan keuangan tersaji secara akurat dengan menampilkan data yang sebenarnya pada tanggal tertentu. Fungsi pembukuan pada SKPD yaitu :

- 1) Pencatatan transaksi jurnal/jurnal akrual
- 2) Pencatatan transaksi penyesuaian pendapatan
- 3) Input saldo awal
- 4) Posting data dan
- 5) Ekspor impor saldo awal dan posting jurnal
- 6) Laporan keuangan

Berikut ini merupakan contoh dari aplikasi online yang digunakan BPKAD Kota Medan dalam pengelolaan data keuangannya:



Sumber : bpkp.go.id

Gambar 4.4 Contoh Aplikasi SIMDA BPKAD

b. Komitmen dari Pimpinan

Dukungan yang kuat dari pimpinan merupakan kunci keberhasilan dari suatu perubahan terutama perubahan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual maka komitmen dari pimpinan adalah hal yang utama, berikut ini pemaparan dari Kepala Bidang Pembukuan Pemerintah Kota Medan:

“Kita disini komit ya untuk harus menerapkan SAP berbasis akrual ini, kalau dukungan dari atasan kita sering melakukan komunikasi dengan Kementerian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri untuk melakukan pembelajaran kesana, jadi kia sering melakukan pengiriman beberapa staf atau pejabat khususnya dibidang

akuntansi untuk pembelajaran kesana.”(Wawancara 14 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komitmen yang dilakukan oleh Pimpinan di Pemerintahan Kota Medan sangat efektif dan efisien sehingga dapat terlaksananya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI secara penuh.

c. Tersedianya SDM yang Kompeten

Persiapan dan penyusunan laporan keuangan berbasis akrual sangat memerlukan SDM yang memiliki kompetensi khususnya dibidang akuntansi pemerintahan agar dapat terwujudnya Standar akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Dalam penerapan SAP Berbasis AkruaI SDM yang Kompeten sangat berpengaruh dapat terlaksananya penerapan tersebut, berikut ini pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan :

“Kalau tingkat pemahaman SDM di Pemko Medan saya katakana nilainya 8 dari 10, sudah cukup baik lah tingkat pemahaman SDM disini. Terakhir tahun sebelum pemberlakuan penyusunan laporan keuangan di Pemko Medan kita sudah melakukan BIMTEK ya untuk seluruh BPK-SKPD. BPK-SKPD itu disini dinamakan untuk Kasubag Keuangan atau Penatausaha Keuangannya, kita buat Kasub Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran sudah kita lakukan pelatihan sih, cuman berapa tahun ini kita tidak melakukan BIMTEK ya, hanya kita sifatnya melakukan pendampingan bukan BIMTEK atau Diklat. Karena setiap SKPD melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan.” (Wawancara 14 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman SDM mengenai SAP berbasis akrual, khususnya dibagian keuangan dan perbendaharaan penerimaan dan pengeluaran di Pemerintah Kota Medan sudah cukup baik dan dengan hal itu penerapan

basis akrual dapat terlaksana dengan baik dikarenakan Pemerintah Kota Medan telah melakukan pelatihan kepada SDM dengan cara pendampingan untuk meningkatkan pemahaman SDM dalam menyusun laporan keuangan.

d. Resistensi Terhadap Perubahan

Sebagai layaknya untuk setiap perubahan, pihak internal yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama, akan enggan mengikuti perubahan yang baru, untuk itu penerapan berbagai kebijakan akuntansi pemerintahan perlu dilakukan melalui sosialisasi.

Dalam penerapan SAP Berbasis Akrual perlunya kebijakan-kebijakan akuntansi diterapkan agar tercapainya hal tersebut, berikut ini pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan di Pemerintah Kota Medan :

“Kebijakan akuntansinya telah kami sesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang Penatausahaan Keuangan Berbasis Akrual dan telah kami sesuaikan dengan kebijakan akuntansi kami disini, Terakhir diubah Perwalikota Medan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan perubahan kedua atas Perwali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014.” (Wawancara 14 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah menyesuaikan dengan ketentuan yang telah tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah daerah, sebagaimana perubahan yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 44

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Medan.

e. Lingkungan/Masyarakat

Masyarakat adalah poin utama untuk mendukung keberhasilan dari penerapan standar akuntansi pemerintah dengan adanya dukungan yang positif dari masyarakat membuat Pemerintah untuk lebih transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kebijakannya.

Dalam menerapkan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah lingkungan/masyarakat sangat berpengaruh penting, berikut ini paparan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pembukuan :

“Ya tentu dukungan dari masyarakat sangat penting bagi kami, karena dapat meningkatkan efektifitas kinerja kami disini untuk membuat laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.”
(Wawancara 14 Februari 2019)

Dari hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Medan dapat meningkatkan efektifitas kinerjanya untuk membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel dari dorongan positif masyarakat dan bukan hanya itu masyarakat dapat membantu Pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrua sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

4. Penyajian Laporan Keuangan PSAP No. 01 Pemerintah Kota Medan

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pedoman yang di pakai untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran di Pemerintah Kota Medan adalah PSAP No.1 tentang Penyajian Laporan Keuangan terdapat 5 paragraf di PSAP 01 yang mengatur mengenai laporan realisasi anggaran yaitu paragraf 35, paragraf 36, paragraf 37, paragraf 38, dan paragraf 39 serta sebanyak 39 paragraf. Dari hasil analisis laporan realisasi anggaran di Pemerintahan Kota Medan terdapat 5 paragraf yang sesuai dengan penyajian laporan keuangan di PP No. 71 Tahun 2010.

4.1 Tabel Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Medan

PEMERINTAH KOTA MEDAN					
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH					
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016					
NO. URUT	URATAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
4	PENDAPATAN - LRA	5.523.623.117.419,81	4.489.065.482.200,50	79,82	4.308.116.916.024,91
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	2.031.996.546.717,81	1.739.796.922.635,50	85,62	1.535.309.574.014,91
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	1.387.127.546.952,00	1.370.149.001.442,32	98,78	1.125.638.762.947,32
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	258.573.650.000,00	111.452.533.261,00	44,19	115.597.958.126,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	12.181.227.000,00	11.005.561.295,00	91,09	8.948.679.468,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	377.513.124.765,81	245.059.146.635,18	64,98	285.124.173.473,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	3.491.627.568.702,00	2.669.308.559.567,00	76,45	2.772.807.342.010,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	2.236.515.051.000,00	2.122.769.416.793,00	94,91	1.900.053.052.440,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	257.310.464.000,00	198.592.781.675,00	77,18	222.056.416.659,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	2.081.721.000,00	728.354.955,00	34,99	2.215.876.789,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.611.940.995.000,00	1.583.624.375.000,00	98,24	1.611.940.995.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	395.181.871.009,00	339.823.505.123,00	83,06	64.640.564.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	336.747.526.860,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	0,00	0,00	0,00	336.747.526.860,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	1.155.077.217.702,00	546.530.142.774,00	47,32	535.205.963.562,00
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	1.154.798.730.307,00	546.260.663.379,00	47,31	535.205.963.562,00
4.2.3.4	Pendapatan Bagi Hasil Retribusi - LRA	278.479.395,00	278.479.395,00	100,00	0,00
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	186.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	186.035.300.000,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	5.546.733.964.019,40	4.394.045.024.264,53	79,22	4.523.672.134.655,15
5.1	BELANJA OPERASI	4.119.300.405.265,40	3.396.509.832.362,53	82,46	3.594.201.837.240,59
5.1.1	Belanja Pegawai	1.045.232.629.924,40	1.882.781.733.186,00	91,20	1.931.524.035.078,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.206.266.989.337,00	1.657.745.767.146,53	75,14	1.611.295.371.244,53
5.1.5	Belanja Hibah	60.000.000.000,00	55.317.675.150,00	92,10	48.888.310.938,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.800.794.000,00	724.656.908,00	9,29	394.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.411.366.637.578,00	997.475.991.902,00	70,68	938.596.131.961,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	123.861.070.001,00	66.525.256.216,00	53,71	49.930.175.600,00
5.2.2	Belanja Modal Perakitan dan Mesin	202.867.433.668,00	133.047.908.037,00	65,59	187.784.016.635,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	147.054.051.225,00	58.483.395.809,00	39,72	96.818.457.515,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jaringan	925.144.505.938,00	733.321.157.013,00	79,27	565.401.311.764,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.399.596.746,00	6.179.174.807,00	49,91	44.665.170.447,00

LAPORAN REALISASI INDEKS PEMBAYARAN DAN INFLASI DAERAH

Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)	REALISASI 2016
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.126.903.100,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
5.3.1	Belanja Tak Terduga	10.126.903.100,00	0,00	0,00	2.871.385.453,50
6	TRANSFER	7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.350.344.960,00	1.779.344.960,00	24,21	1.559.196.340,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(30.461.191.559,59)	13.240.312.875,97	(43,47)	(217.114.414.970,24)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
7.1.1	Penggunaan SBLPA	35.461.191.559,59	35.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	0,00
7.2.3	Pembayaran Pokok Piutang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	30.461.191.559,59	30.461.191.559,79	100,00	252.575.606.530,03
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SBLPA)	0,00	43.701.504.535,76	0,00	35.461.191.559,79

WALI KOTA MEDAN,

DZULMO ELDIN S.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAFTARAN DAN BELANJA DAERAH
Halaman 2 dari 2

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pedoman dalam analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih ini adalah PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Di paragraf 41 dan paragraf 42 dalam PSAP 01 yang mengatur tentang penyajian laporan saldo anggaran lebih. Setelah di analisis laporan perubahan saldo anggaran lebih Pemko Medan ternyata telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 baik di paragraf 41 dan 42.

4.2 Tabel Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kota Medan



PEMERINTAH KOTA MEDAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2017	2016
Saldo Anggaran Lebih Awal	35.461.191.559,79	252.575.606.530,03
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	35.461.191.559,79	252.575.606.530,03
Sub Total	0,00	0,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SINKPA)	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79
Sub Total	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	43.701.504.535,76	35.461.191.559,79

WALI KOTA MEDAN,

DZULMI ELDIN S.

c. Neraca

Pedoman yang di gunakan dalam penyajian neraca adalah PSAP 01 yang mengatur tentang neraca dalam 46 paragraf tetapi penulis hanya mengambil 29 paragraf saja untuk menganalisis penyajian neraca, karena ketentuan-ketentuan pokok neraca tersebut termuat dalam paragraf-paragraf tersebut. Paragraf-paragraf tersebut yaitu paragraf 44, paragraf 48, paragraf 49, paragraf 51, paragraf 52, paragraf 55, paragraf 56,

paragraf 58, paragraf 59, paragraf 60, paragraf 61, paragraf 62, paragraf 63, paragraf 65, paragraf 66, paragraf 67, paragraf 69, paragraf 70, paragraf 71, paragraf 72, paragraf 75, paragraf 76, paragraf 77, paragraf 78, paragraf 79, paragraf 80, paragraf 81, paragraf 82, dan paragraf 84. Dari hasil analisis neraca Pemerintah Kota Medan, sebanyak 29 paragraf yang dianalisis penulis ternyata neraca Pemerintah Kota Medan telah sesuai dan relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Pemerintah Kota Medan sangat fokus dalam menerapkan Standar Akuntansi Berbasis AkruaI dalam Penyajian Laporan Keuangan sehingga laporan neraca tahun anggaran 2017 dapat tersesuaikan dengan efektif dan efisien. Beberapa hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan seperti seringnya mengadakan pelatihan dengan cara pendampingan bagi para pejabat dan staf sehingga dapat tercapainya penerapan basis akruaI secara penuh di Pemerintah Kota Medan di tahun anggaran 2017, serta aplikasi SIMDA yang tidak menjadi kendala yang terlalu rumit bagi SDM di Pemerintah Kota Medan dikarena para SDM nya memiliki tingkat kompeten yang baik dan dapat di katakan nilainya 8.

4.3 Tabel Neraca Pemerintah Kota Medan



NERACA
PEMERINTAH KOTA MEDAN
Per 31 Desember 2017 dan 2016

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	43.535.931.704,86	35.400.941.789,60
Kas di Bendahara Penerimaan	79.986.000,00	20.473.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	76.557.211,00	0,00
Kas di BLUD	101.562.855,90	60.249.770,19
Kas Lainnya	31.531.000,00	367.309.065,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas di BOS	364.203.356,01	2.447.409.730,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	756.306.431.257,51	815.930.904.134,26
Piutang Lainnya	9.275.160.840,11	5.516.628.592,36
Penyisihan Piutang	(208.764.488.668,27)	(147.961.416.548,11)
Beban Dibayar Dimuka	571.791.666,66	890.500.000,00
Perediaan	98.074.400.535,91	84.050.887.906,11
JUMLAH ASET LANCAR	699.655.067.759,69	796.723.887.947,41
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergilir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	331.600.938.315,53	324.308.344.048,53
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	331.600.938.315,53	324.308.344.048,53
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	331.600.938.315,53	324.308.344.048,53
ASET TETAP		
Tanah	23.225.350.253.680,50	23.414.110.751.880,50
Peralatan dan Mesin	1.326.107.112.169,01	1.258.951.595.156,57
Gedung dan Bangunan	1.265.392.014.951,51	1.403.482.876.864,70
Jalan, Tripas, dan Jaringan	5.008.132.867.460,50	4.236.645.318.379,69
Aset Tetap Lainnya	80.457.690.070,67	94.040.358.192,90
Konstruksi Dalam Pengerjaan	23.618.681.018,67	91.835.101.867,67
Akumulasi Penyusutan	(2.718.078.363.934,80)	(2.192.629.323.304,71)
JUMLAH ASET TETAP	28.210.980.255.416,00	26.306.438.679.037,30
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	338.550.426.659,52	338.550.426.659,52
Aset Tidak Berwujud	12.405.862.746,34	11.949.040.807,47
Aset Lain-lain	917.464.630.591,72	162.370.349.797,27
Tagihan Jangka Panjang Angsuran BOT	17.115.954.539,40	18.344.944.713,60
Tagihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00
Piutang Denda dan Kekurangan Pembayaran	0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.285.536.874.536,99	531.214.761.977,86
JUMLAH ASET	30.527.773.126.028,20	29.958.683.673.011,10
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK)	14.547.236,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	204.382.725,00
Pendapatan Diterima Dimuka	9.704.279.685,51	7.643.628.145,31
Utang Beban	143.019.365.064,71	95.670.705.964,24
Utang Jangka Pendek Lainnya	100.225.877.606,00	56.278.423.982,00

URAIAN	2017	2016
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	252.964.069.592,22	159.797.140.816,55
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG:		
Utang Dalam Negeri	0,00	95.164.938.997,87
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	95.164.938.997,87
JUMLAH KEWAJIBAN	252.964.069.592,22	254.962.080.814,42
ERUITAS		
ERUITAS	30.274.809.066.436,00	29.703.721.592.196,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ERUITAS DANA	30.527.773.136.028,29	29.958.683.673.011,10

d. Laporan Operasional

Acuan dalam menganalisis laporan operasional Pemerintah Kota Medan yaitu PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan. PSAP 01 sebanyak 8 paragraf diantaranya paragraf 92, paragraf 93, paragraf 94, paragraf 95, paragraf 96, dan paragraf 97. Terdapat 7 paragraf yang sesuai dengan laporan operasional Pemerintah Kota Medan, walaupun di paragraf 94 pada PSAP 01 tidak sesuai susunan pos-pos dan deskripsi yang digunakan berbeda dengan laporan operasional Pemerintah Kota Medan, seperti yang dijelaskan pada paragraf ke 94 yaitu penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat di ubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi yang dimaksud.

4.4 Laporan Operasional Pemerintah Kota Medan

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2017 DAN 2016					
NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KEHAIKUAN/ (PENURUNAN)	(%)
0	PENDAPATAN - LO	4.891.110.431.881,46	4.549.027.483.380,41	(342.082.948.501,05)	(7,12)
0.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	1.806.811.985.031,46	1.812.070.826.500,48	518.835.771,02	27,04
0.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	1.506.876.945.145,16	1.302.629.826.253,58	204.247.118.891,57	25,31
0.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	114.641.753.564,00	117.546.853.834,80	(2.905.100.270,80)	(2,47)
0.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Saluran Daerah yang Dipisahkan - LO	13.588.498.170,00	8.348.487.687,50	5.239.990.482,50	62,53
0.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	251.624.688.752,30	281.562.287.766,37	(29.937.599.014,07)	(11,28)
0.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	2.463.188.347.188,00	2.713.856.757.386,00	(250.668.409.707,99)	(9,23)
0.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	2.122.789.416.793,00	1.990.853.812.496,00	231.935.604.297,00	11,67
0.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	336.747.526.000,00	(336.747.526.000,00)	(100,00)
0.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	348.279.030.795,00	476.235.378.538,00	(127.956.347.743,00)	(28,44)
0.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	146.728.703.885,00	223.894.066.442,00	(77.165.362.777,00)	(32,88)
0.3.1	Pendapatan Hibah - LO	146.728.703.885,00	223.894.066.442,00	(77.165.362.777,00)	(32,88)
0.3.2	Dana Cadangan - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.1	Surplus Perjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.2	Surplus Penyediaan Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BEBAN	4.811.642.643.296,88	4.312.453.070.863,77	(499.188.406.667,77)	(10,20)
0.1	BEBAN OPERASI	4.835.863.296.476,88	4.388.824.466.278,27	(497.561.189.834,27)	(10,22)
0.1.1	Beban Pegawai - LO	1.408.870.481.816,00	1.028.418.504.575,00	380.451.977.241,00	31,91
0.1.2a	Beban Pemakaian	433.875.981.476,98	486.706.893.979,83	(52.830.912.502,85)	(12,40)
0.1.2b	Beban Jasa	1.148.025.126.714,48	1.198.009.732.153,25	(49.984.605.438,77)	(4,17)
0.1.2c	Beban Pemeliharaan	83.104.281.681,83	83.305.113.870,34	(200.832.188,51)	(0,24)
0.1.2d	Beban Perbaikan Fisik	126.882.452.090,00	93.747.697.498,00	33.134.754.592,00	37,42
0.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
0.1.5	Beban Hibah	55.353.713.150,00	40.888.310.918,00	14.465.402.232,00	35,26
0.1.6	Beban Bantuan Sosial	724.656.900,00	391.000.000,00	333.656.900,00	46,18
0.2	BEBAN TRANSFER	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
0.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
0.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
0.2.6	Beban Transfer Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.1	Defisit Perjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.2	Defisit Penyediaan Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
0.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
0.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	457.468.293.488,46	237.472.393.324,67	220.015.900.163,79	92,63
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	914.576.586.970,93	477.818.172.182,84	436.758.414.818,09	91,49

Lampiran Operasional

Halaman 1 dari 2

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KEHAIKUAN/ (PENURUNAN)	(%)
9.1.7	Beban Penyesuaian dan Anasirasi	418.172.952.828,91	495.271.657.763,62	(77.098.704.934,71)	(18,65)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	56.512.698.948,60	63.182.019.584,81	(6.669.320.636,21)	(10,49)
9.1.9	Beban Lain-lain	40.130.828.827,28	46.882.557.727,23	(6.751.728.899,94)	(14,40)
9.2	BEBAN TRANSFER	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00	220.148.620,00	14,12
9.2.6	Beban Transfer Dana Operasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Perjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.2	Defisit Penyediaan Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	BEBAN LUAR BIASA	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	2.871.385.453,50	(2.871.385.453,50)	(100,00)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	457.468.293.488,46	237.472.393.324,67	220.015.900.163,79	92,63
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	914.576.586.970,93	477.818.172.182,84	436.758.414.818,09	91,49

WALI KOTA MEDAN,

DZULHI ELDEN S.

Lampiran Operasional

Halaman 2 dari 2

e. Laporan Arus Kas

Pedoman dalam menganalisis laporan arus kas Pemerintah Kota Medan adalah PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan yang terdiri dari 2 paragraf yaitu paragraf 89 dan paragraf 90. Dari hasil analisis laporan arus kas di Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan pedoman di PSAP 01 PP No. 71 Tahun 2010. Berikut tabel Laporan Arus Kas di Pemerintah Kota Medan :

4.5 Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Medan

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam Rupiah)		
URAIAN	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Pendapatan Pajak Daerah	1.370.149.681.442,32	1.125.638.762.947,32
Pendapatan Retribusi Daerah	113.452.533.261,00	115.597.958.126,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.095.561.295,00	8.948.679.468,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	126.239.109.501,47	144.361.423.252,49
Dana Bagi Hasil Pajak	198.582.781.675,00	222.056.416.659,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	726.354.995,00	2.215.876.789,00
Dana Alokasi Umum	1.583.624.375.000,00	1.611.940.995.000,00
Dana Alokasi Khusus	339.823.905.123,00	64.640.564.000,00
Dana Penyesuaian	0,00	336.747.526.000,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	546.266.663.379,00	535.205.963.562,00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	278.479.395,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	4.292.245.445.066,79	4.167.354.165.803,81
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Pegawai	2.167.390.836.729,00	2.441.393.474.914,00
Belanja Barang	1.056.993.775.905,53	937.718.496.684,20
Belanja Hibah	55.317.675.150,00	40.988.310.918,00
Belanja Bantuan Sosial	724.656.900,00	394.000.000,00
Belanja Bantuan Ketenagaaan	1.779.344.960,00	1.559.196.340,00
Belanja Tak Terduga	0,00	2.871.385.453,50
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	3.282.206.279.644,53	3.424.924.834.309,70
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	1.010.039.165.422,26	742.429.331.494,11
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Belanja Tanah	66.525.256.216,00	40.930.178.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	132.325.290.887,00	167.021.825.144,00
Belanja Bangunan dan Gedung	58.403.395.809,00	56.818.457.515,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jembatan	733.321.157.013,00	566.401.311.764,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	6.165.115.607,00	44.665.170.447,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	996.840.165.532,00	935.836.940.470,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(996.840.165.532,00)	(935.836.940.470,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.000.000.000,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	5.000.000.000,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(5.000.000.000,00)	0,00
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
<i>Arus Kas Masuk</i>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	310.689.787.919,00	347.072.737.712,00
Saldo Sisa UP TA 20X0	0,00	125.771.780,00
<i>Jumlah Arus Kas Masuk</i>	310.689.787.919,00	347.198.509.492,00
<i>Arus Kas Keluar</i>		
Penculuan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	310.689.787.919,00	347.072.737.712,00
Saldo Sisa UP TA 20X1	128.019.950,00	0,00
<i>Jumlah Arus Kas Keluar</i>	310.817.807.869,00	347.072.737.712,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(128.019.950,00)	125.771.780,00
Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	8.070.979.940,26	(193.281.837.195,95)
Saldo Awal Kas di BUD	35.400.941.789,60	228.682.778.985,55
Saldo Akhir Kas di BUD	43.471.921.729,86	35.400.941.789,60
Kas di Bendahara Penerimaan	79.986.000,00	20.473.500,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	78.557.211,00	0,00
Kas di BUD	101.562.855,90	60.249.770,19
Kas Lainnya	31.531.000,00	367.309.085,00
Setara Kas	0,00	0,00
Kas di BOS	364.203.356,01	2.447.409.738,00
Saldo Akhir Kas	44.127.762.152,77	38.296.383.862,79

f. Laporan Perubahan Ekuitas

Menganalisis laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Medan berpedoman pada PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan dengan 2 paragraf yaitu paragraf 101 dan paragraf 102 yang menjelaskan bahwa laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos seperti ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas yang berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar, serta ekuitas akhir dan entitas pelaporan yang menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Hasil analisis pada laporan perubahan ekuitas Pemerintah Kota Medan, paragraf 101 dan paragraf 102 ternyata sama dengan laporan ekuitas Pemerintah Kota Medan.

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kota Medan

 PEMERINTAH KOTA MEDAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2017 DAN 2016 (Dalam Rupiah)		
URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	29.703.721.592.196,70	29.704.909.066.915,30
SURPLUS/DEFISIT-LO	457.488.203.488,46	237.472.303.324,67
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Salah Revolusi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	113.598.100.750,87	(238.860.688.043,31)
Ekuitas Antar SKPD	0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	30.274.809.066.436,03	29.703.721.592.196,70

WALI KOTA MEDAN,

DZULFI ELDIN S.

B. Pembahasan

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah perlu diselenggarakannya pengelolaan daerah secara profesional dan tanggung jawab sesuai aturan yang berlaku untuk tercapainya *good governance*.

Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 sejak tahun 2015 hal ini dapat dilihat dari indikator dalam teori Simanjuntak (2010) tentang tantangan-tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 yaitu sistem akuntansi, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat telah diatasi dengan efektif dan efisien oleh Pemerintah Kota Medan.

Selain itu dari teori suwanda (2015:86) yang menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah berbasis akrual. Teori ini di jadikan sebagai acuan dalam menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota Medan dengan menggunakan data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Medan Tahun Anggaran 2017.

Terdapat alasan mengapa penelitian ini harus dilakukan dikarenakan masih kurangnya SDM yang memahami dan fasilitas yang disediakan masih kurang memadai di setiap daerah padahal aturan ini sudah berjalan selama 4 tahun lamanya sejak Tahun 2015 oleh karena itu pemerintah daerah dan satuan perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sebagai

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan harus disajikan sesuai PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah.

Di sisi lain ada beberapa peneliti yang meneliti di daerah tertentu di Nusantara yang dilakukan oleh Yunita Kurnia Shanti (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa Penerapan Basis AkruaL pada penyajian kelima laporan keuangan telah sesuai dengan SAP di SKPD Ciputat Timur, Friska Langelo, D.P.E Saerang, S.W.Aleca (2015) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belum di terapkannya PP No. 71 Tahun 2010 di Pemerintah Kota Bitung dikarenakan kendala dalam kesiapan berupa SDM, serta perangkat pendukung yang belum teruji, Amelia TIrta Yuningsih (2018) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa di Poltekkes Makssar telah menerapkan SAP berbasis akruaL dengan efektif baik dari sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya. Evelyn Novianti (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul belum sepenuhnya menerapkan SAP berbasis akruaL baik sistem akuntansi maupun penyusunan laporan keuangannya, dan E.P. Mentu, J.J Sondakh (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010.

Beberapa penelitian sebelumnya memiliki hasil penelitian yang tidak sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 , ini jelas artinya banyak kendala yang

dihadapi oleh Pemerintah Daerah yang tidak dapat teratasi dengan baik sehingga penerapan PP No. 71 Tahun 2010 yang diharapkan sesuai sejak tahun 2015 sampai saat penelitian sebelumnya dilakukan belum dapat diterapkan secara efektif dan efisien. Berbeda dengan peneliti (2019) yang menyatakan bahwa hasil penelitian baik dari segi laporan keuangan telah sesuai dengan PP No. 71 Tahun 2010 dan untuk kendala seperti sistem akuntansi, resistensi, serta lingkungan dan masyarakat telah diatasi dengan baik oleh Pemerintah Kota Medan khususnya di bagian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun daerah untuk tercapainya pemerintah yang transparan dan akuntabel yaitu tertuang pada PP No. 71 Tahun 2010. Selain itu ada beberapa kesimpulan yang penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kota Medan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari 7 laporan keuangan.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa tantangan pemerintah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual seperti Sistem Akuntansi & *Information Technology (IT) based system*, komitmen dari pimpinan, tersedianya SDM yang kompeten, resistensi terhadap perubahan, dan lingkungan/masyarakat dapat diatasi oleh Pemerintah Kota Medan serta tidak terciptanya kendala-kendala yang rumit seperti sistem akuntansi yang dapat mudah dipahami oleh para SDM di Pemko Medan, serta adanya pelatihan yang dilakukan oleh Pemko Medan seperti melakukan pendampingan agar meningkatkan efektifitas kinerja SDM dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diajukan peneliti sebagai hasil dari penelitian ini dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan adalah :

1. BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kota Medan harus lebih memahami secara menyeluruh tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi atau aplikasi SIMDA yang masih adanya beberapa SDM yang belum dapat memahaminya dengan baik dan cepat agar tidak muncul masalah pada saat penerapannya.
2. Adanya cara untuk memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten dibidang akuntansi pemerintahan dengan cara menyusun perencanaan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan mengikut sertakan SDM di bidang akuntansi dalam seminar atau pelatihan dengan cara diklat atau BIMTEK tentang SAP Berbasis Akrual khususnya di Pemerintah Daerah.
3. Untuk peneliti selanjutnya, di sarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian dengan cakupan fokus penelitian dengan tahun anggaran laporan keuangan yang lebih banyak dan PSAP yang dibahas dapat lebih banyak lagi, karena dalam penelitian ini memiliki keterbatasan berupa cakupan fokus penelitian yang relatif kecil yaitu tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 dalam PSAP 01 tentang penyajian laporan keuangan tahun anggaran 2017.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Arfan, Ikhsan, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen*. Bandung : Cipustaka Media
- Augustine, Y. dan R. Kristaung. 2013. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta, Andi
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat
- Erlina, 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah*, USU Press, Medan
- Ghozali, Imam. 2011. *Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang : Badan Penerbit –UNDIP
- Hariadi, Pramono, Yanuar E. Restiyanto dan I.R Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIMYKPN
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi
- Muda, I., & Rasdianto, M. S. L. 2014. *Implementation of the Cash Revenue System: A Case Study In the Local Government Task Forces' units of North Sumatera Province, Indonesia*. *Information Management & Business Review*, 6(2)
- Noor, J. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana
- Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, Yogyakarta, Andi
- Simanjuntak, B. 2010. *Penerapan Akuntansi Berbasis Akrua Di Sektor Pemerintahan Indonesia Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia*.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta

Suwanda, Dadang. 2015. *Sistem Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah Berpedoman SAP Berbasis Akrual*. PPM

Suwanda, Dadang dan Hendri Santosa. 2014. *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman pada SAP*. Bandung : PT. Remaja Rosdakrya

Widjajarso, Bambang. 2008. *Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan*.

Peraturan Pemerintah :

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang *pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang *penerapan standar pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah*

Peraturan Walikota Medan Nomor 24 Tahun 2014 tentang *kebijakan akuntansi pemerintah daerah*

RI No 24 Tahun 2005 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*

Peraturah Pemerintah Nomor 71 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Jurnal :

A. Atika, D. Saraswati, H Chrisna, HAP Nasution, S Pipit Buana (2018). Sukuk Fund Issuance On Sharia Banking Performance In Indonesia. *Int. J. Civ. Eng. Technol* 9 (9), 1531-1544

Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.

Dora, Sofia. 2014. *Analisis Kesiapan Pemerintah Dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada BPKAD Kota Medan)*. Skripsi. Universitas HKBP Nommensen: Medan

Daulay, M. T., Elfindri, Sjafrizal, & Sofyardi. (2018). 1. An Empirical Investigation of Business Diversification and Economic Value on Poverty in Batubara Regency, North Sumatera, Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)*, 841-859.

- Daulay, M. T., Sanny, A., Rini, E. S., & Sadalia, I. (2018). FACTORS THAT INFLUENCING THE SATISFACTION AND LOYALTY OF SILKAIR INTERNATIONAL FLIGHT SERVICE PASSENGERS AT KUALANAMU AIRPORT, DELI SERDANG, INDONESIA. *International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET)* , 1-10.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose* (ESP) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Kesuma, M. A., Lubis, S., Iskandarini, & Daulay, M. T. (2019). The Influence Of Organizational Restructuring On Employee Performance In The Housing And Residential Areas, North Sumatra Province, Indonesia. *American International Journal of Business Management (AIJBM)*, 32-36.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia. KnE Social Sciences*, 760-770.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Shanti, Yunita Kurnia. 2018. *Analisis Penerapan Basis Akrual Atas Standar Akuntansi Pemerintah No. 71 Tahun 2010 dan Dampaknya Pada Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Stauan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Ciputat Timur)*. Jurnal. Universitas Pamulang: Tangerang Selatan

Yuningsih, Amelia Tirta. 2018. *Evaluasi Penerapan PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis AkruaI Dalam Penyajian Laporan Keuangan Politeknik Kesehatan Makassar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: Makassar

Website :

www.medanbisnisdaily.com

www.ksap.org/sap/profil-ksap

www.wikiapbn.org/kerangka-konseptual-akuntansi-pemerintah

www.bpk.go.id

www.mdn.biz.id

www.tribun-medan.com

bppk.kemenkeu.go.id

keuda.kemendagri.go.id

pusdikmin.com